

**SISTEM MANAJEMEN RISIKO TERHADAP
TRANSAKSI PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI
HASIL DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG
PEKANBARU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ekonomi Islam**



OLEH :

**SRI RAHMANY
NIM : 20996201065**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013**

TESIS

SISTEM MANAJEMEN RISIKO TERHADAP TRANSAKSI PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK MUAMALAT INDONESIA PEKANBARU

Nama : Sri Rahmany
Nomor Induk Mahasiswa : 0906S21065
Program Studi : Ekonomi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

DR. H. Mawardi M. Saleh, MA

Pekanbaru,.....

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Islam

DR. Asmal May, MA

DR. H. MAWARDI, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

NOTA DINAS
Hal : Tesis Saudari
SRI RAHMANY

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap isi tesis Saudari :

Nama	: SRI RAHMANY
NIM	: 0906 S2 1065
Prodi	: Ekonomi Islam (EI)
Konsentrasi	: Ekonomi Islam (EI)
Judul	: Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BMI Pekanbaru.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diberikan penilaian, sekian dan
terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,.....2012
Pembimbing,

DR. H. MAWARDI, MA
NIP.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sri Rahmany
Nomor Induk Mahasiswa	: 20996201065
Tempat/Tgl. Lahir	: Bengkalis, 18 Oktober 1987
Program	: Magister
Program Studi	: Ekonomi Islam
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul: **“Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Pekanbaru”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh bagian atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Mei 2013
Hormat Saya,

Sri Rahmany
NIM. 0906 S2 1065

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji terkhusus kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala karunia –Nya buat penulis, sehingga dengan segala kesehatan dan kesempatan penulis telah berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa Tesis. Tidak lupa pula shalawat beriring salam buat Nabi junjungan kita Muhammad SAW yang telah berhasil membawa ummatnya untuk mengikuti derap langkah uswatun khasanah kealam ilmu pengetahuan dengan segala konsekuensinya.

Dengan nama Allah Rabb semesta alam, Tuhan semua manusia. Saya ingin mengawali ucapan terima kasih saya dengan menundukkan diri dan hati untuk mengucapkan syukur atas apa yang telah diberikanNya sehingga Tesis ini dapat terwujud. Atas kemampuan berfikir, energi dan invisible hand yang diberikanNya yang kesemuanya merupakan suatu hal yang menakjubkan. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, sebaik-baik makhlukNya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul, keluarga dan para sahabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan Tesis ini telah banyak kendala-kendala dan kesulitan yang penulis hadapi, dan selama penulisan sampai pada tahap penyelesaiannya telah banyak pula bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang mulia dan teristimewa Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah memberikan didikan dan asuhan selama ini, juga segala bantuan moril maupun materil yang jumlahnya tidak terhingga.
2. Yang terhormat Bapak Direktur UIN Suska Riau Pekanbaru, Bapak Prof. DR. Mahdini, MA yang telah memberikan bantuan dan kemudahan segala bentuk aturan akademik.
3. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Bapak DR. Asmal May, MA atas segala bantuan akademis serta saran dan nasehatnya.
4. Yang terhormat Bapak DR. Mawardi, MA sebagai pembimbing dalam penulisan Tesis ini.
5. Yang terhormat Ibu Pimpinan Pengelola Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam pengadaan dan peminjaman literatur buku.
6. Yang Terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta Civitas Akademika UIN Suska Pascasarjana Riau Pekanbaru atas segala bantuannya.

7. Terakhir kepada rekan-rekan seperjuangan, kerabat karib serta seluruh handai taulan yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dan mengembalikan segala sesuatunya, semoga segala bantuan dan jerih payah semua pihak menerima balasan yang setimpal. Amin.

Penulis

Sri Rahmany

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING DAN PERSETUJUAN PRODI	iv
NOTA DINAS	v
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Metodologi Penelitian.....	8

G. Sistematika Penulisan	11
--------------------------------	----

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Definisi Sistem Manajemen Risiko	13
1. Pengertian Sistem	14
2. Pengertian Manajemen	15
3. Pengertian Risiko.....	16
4. Pembagian Manajemen Risiko	24
5. Strategi Penerapan Sistem Manajemen Risiko.....	31
B. Sistem Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam	40
1. Respon Terhadap Risiko Yang Signifikan	42
2. Perbedaan Manajemen Risiko Syariah dan Konvensional	45
3. Sistem Bagi Hasil	46
4. Analisis dan Pengawasan Pembiayaan	69

BAB III : GAMBARAN UMUM PT. BMI CABANG PEKANBARU

A. Sejarah PT. BMI Pekanbaru	71
B. Visi Dan Misi PT. BMI Pekanbaru	76
C. Budaya Kerja BMI Pekanbaru.....	77
D. Gambaran Kerja karyawan	77

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada BMI Cabang Pekanbaru	81
--	----

B. Penerapan Sistem Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada BMI Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam	111
C. Efisiensi Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada BMI Cabang Pekanbaru	124

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA	133
----------------------	-----

LAMPIRAN.....	
---------------	--

TOFLE

SURAT RISET

KARTU KONTROL

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II-1 : <i>Score</i> Tingkat Risiko.....	18
II-2 : Perbedaan Manajemen Risiko Syariah dan Konvensional	45
IV-3: Penggolongan <i>Collectibility</i>	97
IV-4: Perhitungan <i>Collectibility</i>	98
IV-5: Klasifikasi Transaksi Pembiayaan.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II-1 : Proses Pengendalian Manajemen.....	29
II-2 : Struktur Untuk Mengatur Risiko	32
II-3 : Karakter Manajemen Risiko Dalam Bank	41
IV-4: Proses Manajemen Risiko	82
IV-5: Proses Analisa Kelengkapan Dokumen	91
IV-6: Penyaluran Transaksi Pembiayaan	92
IV-7 : Hakikat Aktivitas Ekonomi.....	112
IV-8 : Pembiayaan PT. BMI Cabang Pekanbaru	128
IV-9 Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Pekanbaru	129

TRANSLITERASI

I. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ر	R	غ	Gh
ب	B	ز	Z	ف	F
ت	T	س	‘Sy	ق	Q
ث	Th	ش	Sy	ك	K
ج	J	ص	S	ل	L
ح	H	ض	D	م	M
خ	Kh	ط	T	ن	N
د	D	ظ	Z	و	W
ذ	Dh	ع	‘	ه	H
				ي	Y

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap tidak ditulis rangkap, misalnya **سلا ميلة** ditulis Islamiyah

III. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya. القرآن (al-Qur'an), Kasrah ditulis i, misalnya ا لكريم (al-Karim), dan dammah ditulis u, misalnya المؤمنون (al-mu'minun)

IV. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, misalnya دار (dar), i, panjang ditulis i, misalnya قيل (qila), dan u panjang ditulis u, misalnya (tubasuna).

V. Vokal Rangkap

Fatah + ya yang dimatikan ditulis ai, ريب ditulis raiba dan fathah + waw yang dimatikan ditulis au, misalnya قول qaulu.

VI. Ta'marbutah

Untuk kata yang berakhiran ta marbutah (ة) diterasliterasikan dengan "ah", misalnya القيمة al-qiamah.

VII. Huruf Besar

Penulisan huruf besar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)

VIII. Singkatan-singkatan

Cet	: Cetakan
Hal	: halaman
Saw	: صلى الله عليه وسلم
SWT	: سبحانه الله وتعالى
Tt	: Tanpa Tahun
Tp	: Tanpa Pengarang
Terj	: Terjemahan

MOTTO

*ILMU TANPA AGAMA
ADALAH LUMPUH,
AGAMA TANPA ILMU
ADALAH BUTA*

*KESUKSESAN TIDAK DATANG
DARI JALAN YANG
ANDA PIKIRKAN,
TETAPI DARI JALAN YANG ANDA
GUNAKAN UNTUK BERFIKIR*

*TIDAK ADA RESEP MISTERIUS UNTUK
MEREALISASIKAN KESUKSESAN,
SEBAB KESUKSESAN ADALAH
HASIL DARI PERSIAPAN
MATANG, KERJA KERAS
DAN KESEIAAN BELAJAR
PADA KESALAHAN*

*JANGAN DUDUK SAJA
DAN MENUNGGU
KESEMPATAN DATANG.....
BERDIRI DAN BUATLAH
PELUANG*

ABSTRAK

Bank syariah merupakan suatu lembaga perantara yang menyampaikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membuka suatu usaha. Setiap pelaksanaan suatu pembiayaan yang dilaksanakan maka harus ditentukan dulu bagaimana sistem manajemen risiko yang diterapkan disuatu perbankan. Karena Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan mempunyai risiko yang sangat tinggi sekali bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Adapun risiko yang terjadi diantaranya risiko bisnis dan risiko syariah. Risiko bisnis merupakan risiko-risiko yang berkaitan dengan jalannya pelaksanaan pembiayaan yaitu risiko keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap bulan, risiko Operasional Pembiayaannya, Risiko Likuiditas, dan Risiko Kepatuhan.

Sedangkan risiko syariah merupakan pelanggaran dari segi syariahnya seperti adanya pembiayaan yang diberikan pihak Bank kepada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan SOP syariahnya. Maka pembiayaan tersebut dinyatakan gagal dari awal pembiayaan walaupun pihak bank telah memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Dengan sistem manajemen risiko terhadap pembiayaan maka diharapkan agar pembiayaan dengan sistem bagi hasil akan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam tanpa adanya ketimpangan dalam pelaksanaannya. Adapun bentuk proses dari manajemen risiko terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil diantaranya proses inisiasi, dokumentasi, dan monitoring.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan Dengan metode kualitatif maka setiap data yang diperoleh yang berkaitan dengan sistem manajemen risiko terhadap transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan data yang diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara dan dokumentasi kepada Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Khususnya bagian Marketing dan Internal Audit yang terjun langsung dalam penyaluran pembiayaan.

Dari hasil penelitian tersebut maka ada beberapa penemuan yang bisa dijadikan kesimpulan diantaranya yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya risiko dalam suatu pembiayaan dengan sistem bagi hasil diantaranya adalah pertama pihak marketingnya dalam menghitung nisbah bagi hasil dan marginnya sesuai dengan proyeksi dari awal akad tanpa mengevaluasi dan mengecek kembali pelaksanaan yang secara real terjadi terhadap usaha atau kegiatan dari nasabahnya. Yang kedua, sebagian besar nasabah yang diterima UP nya tidak memenuhi syarat Pembiayaan walaupun telah diberikan Assesment oleh Pihak

Independent Division. Sedangkan Yang ketiga, sebagian besar nasabah yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban jatuh temponya sering sekali mendapatkan perpanjangan waktu sehingga nasabah bisa memperpanjang tunggakannya dan merugikan pihak bank (kurang tegasnya dalam menentukan jangka waktu perpanjangan pelunasan kewajiban jatuh temponya).

Dengan risiko yang terjadi tersebut maka jumlah pembiayaan yang mengalami kemacetan semakin meningkat sekitar 30% pertahunnya. Yang diawali dengan kurang lancar dalam memenuhi kewajiban. Dan menyebabkan Bank sulit dalam meningkatkan penyaluran pembiayaannya.

ABSTRACTEDLY

syariah's bank constitutes a brokerage house that passes on to lent fund to society that needs to open an effort. Each performing an executed finances therefore have before been determined how management system runs the risk that applies to be operated an banking. Since Finances with executed production sharing system have risk that highly really can happen whenever and wherever. There is risk even that happening among those syariah's business and risk risk. Risk carries on business to constitute risk that gets bearing with the way finances performing which is client delay risk in accomplish its liabilities each month, Financeses Operational risk it, Liquidity risk, and compliance Risk.

Meanwhile syariah's risk constitute breach of syariahnya's facet finances as is that is given sides Bank to client that don't qualify syariahnya's SOUP. Therefore that finances is stated unsuccessful from the beginning despite finances sides bank have given finances to that client.

With management system runs the risk to finances therefore expected that finances with production sharing system will performed with every consideration in accordance with provisions syariat Islam without marks sense lameness in its performing. There is form even process of risk management to finances with production sharing system amongst those processes initiation, documentation, and monitoring.

This observational performing executed With kualitatif's method therefore each acquired data one gets bearing with management system runs the risk to finances transactions with production sharing system constitute acquired data of yielding Observation, Interview and documentation to on one's side Bank Muamalat Is Branch Indonesian Pekanbaru, Notably sectioned Marketing and Internal Audit which falls directly in finances channelizing.

Of that research result therefore available many find who that diadika can conclusion amongst those what does become happening cause prime factor it risk in a finances with production sharing system amongst those is party first marketingnya in account production sharing and margin family name it corresponds to projection from the beginning agreement without evaluate and mengecek is back performing that real's ala happens to effort or activity of its client. Secondly a considerable part client which accepted by UPnya despite Finances ineligibility was given Assesment by Independent Division's Party. One that drd a large part client that experience delay in accomplish its maturity value

liabilities frequent once get time prolongation so makes client for can lengthen its arrears and adverse side bank (insufficiently its explicit in determine redemption prolongation duration does bit its maturity value).

With that happening risk therefore finances amount that experience jam progressively increases around 30% pertahunnya. One that started by insufficiently smooth deep pock does bit. And causes difficult Bank in increase its finances channelizing.

ملخص

البنك الإسلامي هو المؤسسات الوسيطة التي توفر الأموال للمجتمع المحتاجون لتمويل لبدء تشغيل الأعمال التجارية.

وكل تطبيق في التمويل لا بد فيه نظام تنفيذ التمويل الذي يحدد في إدارة البنك. لأن نظام التمويل لديهم مخاطر عالية جداً، وليس من المستحيل أن يصيب البنك أو العميل في أي وقت كان أو في أين كان.

ومن هذه المخاطر منها: في الأعمال في الشريعة.

وترتبط بمخاطر الأعمال، يعني في وجود أو عدم وجود التمويل أو التأخر العميل في أداء الوفاء كل شهر، ثم من مخاطر الأعمال في التمويل هو التشغيل والسيولة والطاعة.

أما مخاطر الشريعة إشكالها في أحكام الشريعة نفسه. مثل: التمويل التي يعطيه البنك إلى العميل لا يكفي في إجراءات التشغيل الموحدة. وإذا حدث هذا الإشكال، فالتمويل لم يكن ناجحاً مع نظام من أجل تحقيق النتائج. ولو كان البنك قدم و أعطى التمويل للعملاء.

أما الغرض من إدارة المخاطر المالية هو التمويل معاً لتنفيذها بشكل صحيح وموفقاً بأحكام الشريعة الإسلامية بعدم اختلال التوازن في التنفيذ.

وأما شكل من عملية إدارة المخاطر المالية في التمويل مع نظام من أجل تحقيق النتائج في ما يلي: الإستهلال الوثيق والمراقبة.

كتبت هذا البحث بطريقة البحث الكيفي. أما مصادر المعلومات وجدت من الملاحظة والمقابلات وتوثيقات من أصحاب وأعضاء البنك "معاملات إندونيسيا" باكان باروا، وخاصة في التسويق الذي عنده العمل لتوزيع التمويل.

ومن هذا البحث هناك بعض النتائج التي اختصرت، ومن الأمور التي تسبب المخاطر المالية في التمويل من أجل تحقيق النتائج:

أولاً، اعتماد التسويق على بحث النتائج فقط ثم تقسمها إلى العميل قبل العقد الأول دون مراقبة عميقة مسيطرة على جهد عمله في تجميع الحصيل والنتائج.

ثانياً، أن الغالبية من أعظم العملاء لا يؤدي مسؤوليته كما كتب في عقد الأول، ولودفع مجلس الإدارة التمويل إليه.

ثالثاً، التأخر بعض العملاء في أداء الوفاء بالتزاماتهم بالنصح، وغالباً وجد العميل ما تحصل على توسيع للوقت و يلحق الضرر على حساب البنك.

وأن ذلك المخاطر تجعل التمويل توقفاً و متزايداً حوالي 30% في السنة. مع مبادرة من الالتزامات غير المتداولة، وذلك كله يسبب البنك صعوبة في تحسين توزيع التمويل إلى غيره ولا يستطيع أن ينال تطوره.

والله تعالى أعلم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Bank Syariah memberikan wajah baru dalam dunia perbankan, yang menunjukkan bahwa konsep Islam bukan hanya sekadar amalan ritual semata, namun jauh dari itu. Islam mempunyai konsep yang cukup luas serta ajarannya yang cukup komplit mencakup seluruh aspek muamalat (ekonomi) yang menjadi bagian dalam setiap gerakan kehidupan manusia.¹

Berdasarkan kebijakan pemerintah, Bank Muamalat merupakan bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia, yang lahir sebagai kerja tim perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor.

Eksistensi bank syariah menjadi lebih jelas setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mencakup segi kelembagaan dan landasan operasional syariahnya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998. Bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus.

Dengan adanya Undang-Undang dan Landasan Syariah yang telah sah dikeluarkan maka bank syariah bisa mengembangkan kemampuannya dalam

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.25.

menyalurkan pembiayaan dan membantu masyarakat dalam membangun suatu usaha. Sehingga pembiayaan sangat penting bagi kelancaran dan kesehatan dari bank itu sendiri. Untuk kelancaran dari pembiayaan yang dilaksanakan di Bank Muamalat cabang Pekanbaru maka sangat dibutuhkan sekali sistem manajemen risiko yang mengontrol pelaksanaan pembiayaan tersebut, karena risiko sangat besar sekali kemungkinan terjadinya pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan juga sebenarnya pengelolaan risiko itu apakah sama antara bank syariah dan juga bank konvensional dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Sehingga alasan tersebut menjadi awal pertama kalinya ketika Saya tertarik untuk Melaksanakan wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dan menanyakan Apakah Pelaksanaan Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil yang disalurkan mempunyai tingkat risiko yang tinggi? “Bagian Marketing nya Mengatakan, Bahwa dalam Pelaksanaan penyaluran pembiayaan khususnya dengan sistem bagi hasil tingkat risikonya sangat tinggi yang harus dihadapi oleh pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru. Adapun risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut diantaranya adalah Risiko Bisnis dan Risiko Syariah.

Risiko Bisnis merupakan risiko yang berkaitan dengan jalannya pelaksanaan pembiayaan yaitu risiko keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap bulan, risiko Operasional Pembiayaannya, Risiko Likuiditas, dan Risiko Kepatuhan. Sedangkan Risiko Syariahnya merupakan pelanggaran dari segi syariahnya seperti adanya pembiayaan yang diberikan pihak Bank kepada nasabah yang mempunyai Hotel yang tidak mempunyai

Dewan Pengawas Syariahnya. Maka pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena hotel yang diberikan Pembiayaan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dari segi Prosedural apakah sudah memenuhi standar permintaan nasabah atau belum, atau apakah semakin bertele-tele atau semakin sempurna dari tahun ketahunnya. Bisa terjadi kemungkinan penambahan biaya dalam penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru karena adanya Team Independent Division sebagai pihak yang memberikan kebijakan tentang kepribadian nasabah sebelum bagian Account Officer menyatakan nasabah tersebut diterima UP nya (Usulan Pembiayaan) atau mungkin ditolak. Karena pihak Account Officer sering kelabakan ketika ingin memberikan keputusan tentang penerimaan atau penolakan kepada nasabah. Semakin sulitnya pihak marketing dalam memperkirakan tentang kepribadian nasabah maka akan berdampak terhadap pemenuhan kewajiban nasabah setiap bulannya sesuai dengan masa jatuh temponya.

Sehingga menyebabkan pembiayaan semakin bermasalah dan macet. Dan selanjutnya akan mengikis modal Bank kepada nasabah dan bisa dikatakan bahwa suatu manajemen risiko sangat dipengaruhi dari suatu transaksi pembiayaan dan bisa meminimalisir dari suatu risiko yang akan dihadapi. Untuk meminimalisir setiap risiko yang akan terjadi dalam suatu pembiayaan maka bisa dilaksanakan Evaluasi dan pengukuran risiko bertujuan untuk mengenali dan memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang baik, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis

dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Terdapat beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risikonya.

“Dan apakah pengelolaan risiko yang dihadapi mempunyai kesamaan ataupun perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional dalam menerapkan manajemen risikonya? Pihak Bank Menjawab, Bahwa sistem manajemen risiko yang ditentukan oleh BI kepada semua bank baik itu bank syariah maupun konvensional sebenarnya sama karena sistem manajemen risiko yang digunakan merupakan kombinasi dari manajemen risiko yang ada di Bank Konvensional dan pada Bank Syariah, akan tetapi yang membedakannya adalah setiap pelaksanaan sistem manajemen risiko di bank syariah harus disesuaikan dengan fatwa MUI yang akan dikontrol oleh pihak DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan jika ada yang tidak sesuai maka tidak akan dilaksanakan pembiayaannya². Sedangkan di bank konvensional tidak perlu adanya Fatwa untuk melaksanakan sistem manajemen risiko.

Setelah melalui Proses Pengawasan DPS, Probabilitas juga bisa digunakan untuk mengukur risiko. Ketika probabilitas tinggi, maka suatu risiko perlu mendapat perhatian lebih ekstra. Pengukuran risiko yang lainnya bisa pula dilakukan dengan teknik durasi. Hal ini biasanya dilakukan untuk menilai perubahan tingkat bunga. Untuk risiko pasar, bisa digunakan teknik *value at risk*. Setelah melakukan analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko.

²Rudi, *Bagian Marketing Lending* , PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, hari Senin Tgl 2 November 2012

Dari keterangan di atas maka semua risiko bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya risiko yang lainnya.

Untuk mewujudkan suatu aplikasi pembiayaan yang adil dan efisien sebelum dana tersebut diluncurkan kepada masyarakat, maka pihak bank harus mempunyai suatu prosedur manajemen yang bisa mengawasi setiap produk yang akan dikeluarkan. Untuk itu sebelum pembiayaan dilaksanakan maka setiap prosedur manajemen risiko terhadap pelaksanaan pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang telah dikeluarkan.

Dengan manajemen risiko terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, maka akan memberikan dampak positif terhadap pembiayaan yang akan dilaksanakan dan juga akan dijadikan sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan sebelum dana tersebut diluncurkan kepada nasabah. Ini merupakan salah satu strategi Bank untuk meminimalisir risiko yang mungkin muncul dikemudian harinya ketika telah terjadinya pembiayaan.

Pentingnya suatu manajemen risiko terhadap pelaksanaan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, karena manajemen risiko merupakan prosedur dan dasar pertama sebelum suatu pembiayaan khususnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan. Maka perlu disingkap bagaimana suatu sistem manajemen risiko yang dilaksanakan di BMI Cabang Pekanbaru sebelum transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil dilaksanakan, sehingga sesuai

dengan prosedur dan ketentuan syariah Islam tanpa merugikan kedua belah pihak baik itu pihak Nasabah ataupun pihak Bank.

Dari yang dikemukakan di atas maka penulis memilih judul penelitian **SISTEM MANAJEMEN RISIKO TERHADAP TRANSAKSI PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKANBARU.**

B. Identifikasi Masalah

Penulis sangat tertarik untuk memilih judul sistem manajemen risiko terhadap transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil di PT. BMI Pekanbaru, alasannya :

1. Sistem manajemen risiko merupakan suatu bentuk dasar dan pedoman sebelum dilaksanakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil ke pada nasabah. Sehingga pelaksanaan pembiayaan tidak akan menyimpang dari ketentuan syariat Islam
2. PT. BMI Cabang Pekanbaru merupakan salah satu bank syariah yang pesat berkembang dalam bidang pembiayaan dengan sistem bagi hasil untuk itu sangat dibutuhkan suatu sistem manajemen risiko yang akan menjadi pelaksanaan pembiayaan semakin adil dan efisien.
3. Sistem Manajemen Risiko merupakan suatu prosedur yang akan terus berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama dengan berdasarkan peraturan BI dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan tercapainya tujuan penelitian ini, maka dipandang perlu ntuk penulis memberikan batasan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Maka penelitian ini di fokuskan pada setiap risiko pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya dan sesuai dengan judul yang penulis teliti, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem manajemen risiko terhadap transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada BMI Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah Penerapan Sistem Manajemen Risiko Pada Pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada BMI Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam?
3. Bagaimana efisiensi sistem manajemen risiko terhadap transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada BMI Cabang Pekanbaru ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem manajemen risiko terhadap transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada BMI Cabang Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui seberapa efisiensi pelaksanaan sistem manajemen risiko terhadap transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada BMI Cabang Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui secara realnya penerapan sistem manajemen risiko terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil menurut ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir khususnya di bidang pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi BMI sebagai sumber informasi dan masukan dalam melaksanakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
- c. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama pada masa yang akan datang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja³.

³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Edisi I, Cet I, PT. Rajagrafindo Persada, 2005, h.188

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di BMI Cabang Pekanbaru khususnya pada bagian sistem manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan.

3. Populasi dan Sampel

Populasinya merupakan seluruh karyawan BMI Cabang Pekanbaru dan Sampelnya merupakan karyawan bagian account officer, bagian support financing dan Internal Audit.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah :

- a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak perusahaan secara terbatas.
- c. Kepustakaan, yaitu Sumber-sumber/ literatur yang menjadi acuan dan yang benar-benar dijadikan rujukan.

- d. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang telah jadi tanpa perlu dirubah.⁴

5. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dengan objek penelitian, datanya seperti permohonan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, persyaratan dari awal akad perjanjian pembiayaan, checklist dokumen, surat pernyataan, dan margin rate yang berlaku.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang telah jadi yang disusun perusahaan. Datanya merupakan pendapatan dari pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh BMI Cabang Pekanbaru.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu metode yang menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Dari hasil perbandingan tersebut diambil kesimpulan dan dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa sasaran yang berguna bagi bank.

⁴Tim Penyusun Buku Panduan Skripsi STIE Syariah Bengkalis, *Buku Panduan Skripsi*. Bengkalis, 2006, h.53

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran tentang penulisan Tesis dari hasil penelitian ini, berikut akan diuraikan secara singkat tentang sistematika penulisan atau kerangka penulisan yang dibagi menjadi lima bagian :

Bab I Pendahuluan

Bab ini yang didalam uariannya meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang Landasan Teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan analisis dalam penelitian. Bab ini berisi uraian tentang Definisi Sistem Manajemen Risiko, Pengertian Sistem, Pengertian Manajemen, Pengertian Risiko, Pembagian Manajemen Risiko, Strategi Penerapan Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam, Respon Terhadap Risiko Yang Signifikan, Perbedaan Manajemen Risiko Syariah dan Konvensional, dan Sistem Bagi Hasil.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini akan mengulas tentang Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Visi dan Misi Bank, Budaya Kerja Bank, Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, dan Gambaran Kerja Karyawan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, Penerapan Sistem Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam, dan Efisiensi Sistem Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Sistem Manajemen Risiko

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam Rasulullah saw, bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani, *“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”* (HR Thabrani)

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.⁵

⁵Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah, h.34. Lihat pada, Didin Hafinuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Edisi I, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2003, h. 1

1. Pengertian Sistem

Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani (sust ma) dan bahasa Latin (syst ma). Berikut ini ada beberapa pengertian sistem yang diambil dari berbagai sumber.

1. Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks.
2. Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain.
3. Kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis.
4. Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur⁶.

Contoh konkret dari sebuah sistem diantaranya:

- a. Organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem eksresi, sistem saraf, sistem kerangka, dan lain-lain.
- b. Komponen elektronik komputer yang membentuk sistem komunikasi, sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, sistem jaringan, dll.
- c. Rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di Negara kita. Sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem hukum, sistem kebudayaan.

Sekian saja artikel pendek kali ini mengenai pengertian sistem dan definisi sistem. Mudah mudahan bisa membantu kawan semuanya. Jangan segan

⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan I, Jakarta, h. 35

untuk memberikan pendapat, komentar anda dengan berkomentar pada kolom dibawah. Sukses selalu.

- d. Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan objek/benda yang memiliki hubungan diantara mereka⁷.

2. Pengertian Manajemen

Sedangkan Manajemen merupakan suatu dasar dalam pengelolaan suatu usaha, khususnya pada bank syariah. Dengan manajemen segala sesuatu akan teratur sesuai dengan ketentuan nya masing-masing.

Dengan adanya manajemen maka segala sesuatunya khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah akan terlaksana sesuai dengan perencanaan dan tidak akan bertolak belakang dengan agama⁸.

Manajemen dapat diartikan sebagai proses memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen juga dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang orang menjalankan pekerjaan.

Manajemen merupakan suatu sistem yang mengatur kewenangan, sistem, prosedur operasional organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam rencana strategi bank.

⁷*Ibid*, h. 57

⁸Ahmad Muhammad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan II, Penerbit Pustaka Setia, h. 203

3. Pengertian Risiko

Sedangkan risiko ada beberapa pengertian sesuai dengan pendapat para ahli. Mengutip dari tulisan Silalahi (1997), beberapa pengertian risiko.

- 1) Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian
- 2) Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian
- 3) Risiko adalah ketidakpastian
- 4) Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan
- 5) Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan

Risiko dalam konteks perbankan menurut Karim (2003) merupakan suatu kejadian potensial, baik *anticipated* (dapat diperkirakan) maupun *unanticipated* (tidak dapat diperkirakan) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Menurut Djohanputro (2004), risiko terkait dengan adanya keadaan tidak pasti dan tingkat ketidakpastian terukur secara kuantitatif yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan. Menurut Kountur (2004), risiko sebagai suatu keadaan tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan sehingga dapat memberikan dampak yang merugikan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi, maka dilakukan penilaian risiko yang mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut⁹ :

1. *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada *first way out*.

Default Risk adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut¹⁰ :

⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 1*, Edisi 1, Cetakan I, Penerbit Dewan Bahasa, h. 125

- a. *Industry Risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal berikut :
 1. Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
 2. Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama perkembangan *Non Performing Financing* jenis usaha yang bersangkutan.
 3. Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*Industry Financial Standard*).
 - b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.
 - c. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C import, bank garansi), *marker risk*, *forex risk*, *interest risk*, *security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.
2. *Recovery Risk* (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada *second way out*. *Recovery risk* yaitu risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut :
 - a. Kesempurnaan pengikatan jaminan
 - b. Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan)

¹⁰Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Edisi I, Cetakan III, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, h.

- c. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan lamanya taksasi ulang jaminan
- d. Kredabilitas penjamin (jika ada)

Default Risk akan menentukan *Customer Risk Rating* (CRR, rating risiko nasabah). Jika kondisi *industry risk* dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR akan tinggi ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai skor sebagai berikut :

Tabel II-1 *score* Tingkat Risiko

<i>Rating</i>	Score	<i>Tingkat Risiko</i>
1 = baik sekali	5	<i>Very low Risk</i>
2 = baik	4	Low Risk
3 = cukup / sedang	3	Moderate risk
4 = kurang	2	High risk
5 = buruk sekali	1	Very high risk

Sumber : Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Edisi III, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.262

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait dan risiko terkait pembiayaan korporasi¹¹.

Risiko pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah

¹¹Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Edisi III, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.262

sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*¹².

Risiko pembiayaan sulit dikenali tanpa menguji portofolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko pembiayaan adalah diversifikasi dari tipe-tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standar pengendalian pembiayaan yang diterapkan.

Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntunganjual-beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan¹³.

Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu. Faktor-faktor penyebab masalah harus dihilangkan, dan syarat-syarat yang sempurna merupakan bagian terpenting dalam proses pemberian pembiayaan. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian harus menjadi perhatian utama dalam manajemen pembiayaan.

¹²Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan I, Penerbit Magistra Insania Press, h. 23

¹³Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan I, Jakarta, h. 206

Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi *forecasting*, *objective*, *policies*, *prgrames*, dan *budget*¹⁴.

- a. *forecasting* adalah suatu peramalan yang sistematis, untuk mencapai sesuatu yang paling mungkin diperoleh di masa yang akan datang, dengan melakukan penaksiran dan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah untuk memberi informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakeholders*-nya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.
- c. Kebijakan bank merupakan bidang pembiayaan yang perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan dasar (*basic policies*) umumnya meliputi hal-hal berikut :
 1. Kebijakan pembiayaan merupakan salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan misi dan usaha pencapaian visi bank. Segmentasi pembiayaan dapat ditetapkan dalam bentuk pilihan sektor usaha nasabah (*line of business*) atau tipe nasabah (*size of businiss*).
 2. Jenis pembiayaan yang disediakan bagi nasabah berkaitan erat dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingin dilayani. Jenis nasabah tertentu

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan :Teori, Praktik dan Realitas Ekonomi Islam, Magistra Insania, Jakarta,h. 56*

cukup dilayani melalui beberapa jenis pembiayaan untuk memperoleh barang atau modal kerja saja, tetapi nasabah lain memerlukan jenis pembiayaan lain yang lebih terkait dengan kombinasi jasa informasi dan pelayanan bisnis perusahaan seperti *trust and corporate service*.

3. Wilayah pelayanan berkaitan dengan perencanaan jaringan kerja, pembukaan kantor-kantor cabang dan besar kecilnya kantor-kantor cabang tersebut. Sentra-sentra ekonomi harus ditelaah terlebih dulu, seperti pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan desentralisasi manajemen dan pendelegasian wewenang.
 4. Sistem penyampaian (*Delivery system*) kebijakan ini berkaitan dengan pola perluasan jangkauan pemasaran dan penyampaian produk dan jasa bank. Sebagian bank mengutamakan penggunaan jaringan organik yang dimilikinya sendiri seperti kantor cabang, kantor kas, dan sebagainya. Sebagian bank lain memilih melakukan *outsourcing* dengan menggunakan agen-agen sebagai *remarketer*.
 5. Distribusi pembiayaan, dalam memutuskan besarnya pembiayaan kepada nasabah besar dan nasabah terkait, diperlukan adanya kebijakan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank.¹⁵
- d. *Programmes* adalah sederetan kegiatan yang dipaparkan untuk melaksanakan *policies*. Program itu merupakan rencana kegiatan (*action plan*) yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan terikat dengan ruang

¹⁵*Ibid*,h. 58

(*place*) dan waktu (*time*). Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkaiterat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi (*closely integrated*).

- e. *Budget* adalah suatu taksiran atau perkiraan volume portofolio pembiayaan yang ingin dicapai selama kurun satu periode anggaran, termasuk biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang.¹⁶

Kelancaran suatu transaksi pembiayaan suatu bank juga mempunyai kepentingan utama bagi manajemen puncak (*top management*). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*out put*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan¹⁷

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni sebagai berikut :

¹⁶*Ibid*, h. 97.

¹⁷Mat Hasan Abu Bakar, *Apa Itu Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan I, PTS Malaysia, h. 47

1. Analisis pembiayaan yang keliru, dalam konteks ini, terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi.
2. *Creative accounting* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.
3. Karakter nasabah terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.¹⁸

Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat digunakan dengan segera dan mudah sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan sistem informasi manajemen memiliki kesanggupan memberikan berbagai jenis informasi dengan cepat dan akurat serta memberikan fleksibilitas dalam cara penyajiannya. Melalui laporan ini para manajer dapat memperoleh informasi atau data yang tidak termuat dalam laporan regular, yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan tertentu¹⁹.

Dari suatu pembiayaan yang paling penting modal yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Dalam pandangan syariah, modal pinjaman (*subordinated loan*) itu

¹⁸*Ibid*, h. 265.

¹⁹J. Winardi, *Manajemen Perubahan (Management Of Change)*, Edisi I, Cetakan 2, Prenada Media Group, h. 28.

termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literatur fiqh salaf ash shalih, *qard tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁰

4. Pembagian Manajemen Risiko

Tipe Pertama dan yang lebih tradisional merupakan risiko yang sulit dikendalikan manajemen perusahaan, seperti risiko kebakaran akibat arus listrik dan penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Perusahaan biasanya melindungi dirinya, misalnya, dengan cara membeli asuransi.

Tipe Kedua adalah risiko yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Risiko ini dapat terjadi misalnya pada saat perusahaan membangun pabrik baru, meluncurkan produk baru atau membeli saham dan perusahaan lain. Jika salah memprediksi, perusahaan tersebut akan menderita kerugian.

Untuk mengidentifikasi setiap bentuk kerugian maka, harus bisa mengidentifikasi *Hazard* adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Dalam mengidentifikasi *hazard*, pengalaman tidak dapat terlalu diandalkan. Oleh karena itu identifikasi ini merupakan alat paling efektif yang tersedia. Pengidentifikasian *hazard* harus didekati secara bersama karena tidak seorang pun yang dapat melakukannya sendiri dengan sukses. Semboyannya : “Pikirkanlah kesalahan yang dapat terjadi, sekecil apa pun kemungkinannya”.

²⁰Husein Umar, *Manajemen Risiko Bisnis*, Edisi II, Cetakan II, Gramedia, Jakarta, 2001, h. 6.

Berdasarkan hasil identifikasi *hazard*, tahap berikutnya adalah menganalisis risiko yang terkait, bagaimana dan seberapa besar kemungkinannya. Kesuksesan tahap ini tergantung pada kualitas analisis risiko dan biaya.

1. Apa hasil terbaik ?
2. Apa hasil yang paling mungkin ?
3. Bagaimana kemungkinannya masing-masing ?²¹

Ketiga pertanyaan tersebut masing-masing harus mendapat perhatian yang cukup. Analisis dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada situasi (waktu, biaya dan kapabilitas).

Konsep penting lainnya adalah interaksi. Interaksi terjadi bila dua buah *hazard* atau lebih terjadi sekaligus. Misalnya, situasi lemahnya pengawasan internal terjadi pada ketidakjujuran yang terjadi dalam suatu lingkungan. Pengalaman dan pikiran jernih merupakan jalan terbaik untuk menaksir interaksi secara konsisten.

Supaya setiap risiko bisa diatasi maka harus dilaksanakan pengawasan risiko sebagai berikut

- a. Membangun Pengawasan Risiko : kadar pengawasan yang harus dibangun untuk mengeliminasi *hazard* dan mengurangi risiko. Begitu pengawasan risiko dibangun, maka risiko dievaluasi sampai ia dapat dikurangi hingga ke tingkat dimana manfaatnya lebih banyak dari pada biaya potensial.

²¹Zainal Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan II, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, h. 230.

- b. Mengidentifikasi Pengawasan Risiko : pembangunan pengawasan risiko diawali dengan pengambilan tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya, dan mengidentifikasi sebanyak mungkin pilihan pengawasan risiko yang mungkin diambil bagi semua *hazard* yang melampaui tingkat risiko yang bisa diterima.
- c. Menentukan Efektifitas Risiko : setelah identifikasi pilihan pengawasan risiko, proses berikutnya adalah menentukan efek dari setiap pengawasan yang berkaitan dengan *hazard*.
- d. Memilih Pengawasan Risiko : pengawasan terbaik adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal.²²

Setiap keputusan pengelolaan risiko harus dibuat secara dini dalam tahap penyusunan perencanaan. Hal ini lebih mudah diintegrasikan dalam suatu operasi dari pada mencoba menyelipkannya pada tahap akhir. Keputusan yang demikian dibuat setelah menganalisis secara hati-hati semua aspek operasi. Proses tersebut harus logis melalui konsultasi dengan semua unsur atau pihak yang relevan. Pada dasarnya tahap ini harus dilakukan oleh kelompok manajemen senior yang bertanggungjawab atas strategi pengelolaan risiko.

Setelah tahap pengambilan keputusan terhadap pengelolaan risiko pembiayaan secara dini maka tahap berikutnya adalah menerapkan pengawasan. Ini adalah tahap di mana manfaat persiapan dan pemikiran yang hati-hati menjadi jelas.

²²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan IV, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, h. 231.

Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam penerapan pengawasan, haruslah ditemukan kebutuhan mutlak untuk mendapatkan satu pendekatan menyeluruh terhadap risiko pembiayaan, dan kebijakan umum harus dipertahankan dengan ketat untuk memastikan integritas.

Dengan memperketat setiap kebijakan dalam pengambilan keputusan maka akan mempertahankan setiap integritas dari setiap pelaksanaan pengawasan manajemen risiko pembiayaan yang dilaksanakan sehingga pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan akan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.²³

Manajemen pada semua level harus diberi wewenang untuk mengkomunikasikan semua standar yang diperlukan kepada staf mereka dan kemudian menerapkannya dalam wilayah tanggungjawab mereka. Manajemen tidak boleh menganggap staf mereka sudah tahu atau mengerti pengawasan yang ditentukan. Setiap pernyataan yang berhubungan dengan manajemen risiko harus jelas, praktis dan disosialisasikan.

Setiap program manajemen risiko, khususnya manajemen risiko pembiayaan harus secara berkesinambungan ditinjau dan diperbaharui. Risiko operasional itu dinamis dan terus berubah. Program tersebut tidak bisa hanya ditulis sebagai doktrin lalu dilupakan.

Tanggungjawab manajemen untuk memastikan bahwa standar minimum telah diikuti dan standar maksimum dicapai seoptimal mungkin. Bila ditemukan

²³Ibrahim Lubis. *Pengendalian dan Pengawasan manajemen*, Edisi VI, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 7.

sesuatu yang tidak direncanakan, maka program tersebut harus dihentikan dan dievaluasi.

Manajemen risiko pembiayaan memerlukan suatu sistem pengendalian dalam pelaksanaannya sehingga setiap pelaksanaan program manajemen tersebut akan membentuk suatu proses yang lebih baik. Sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

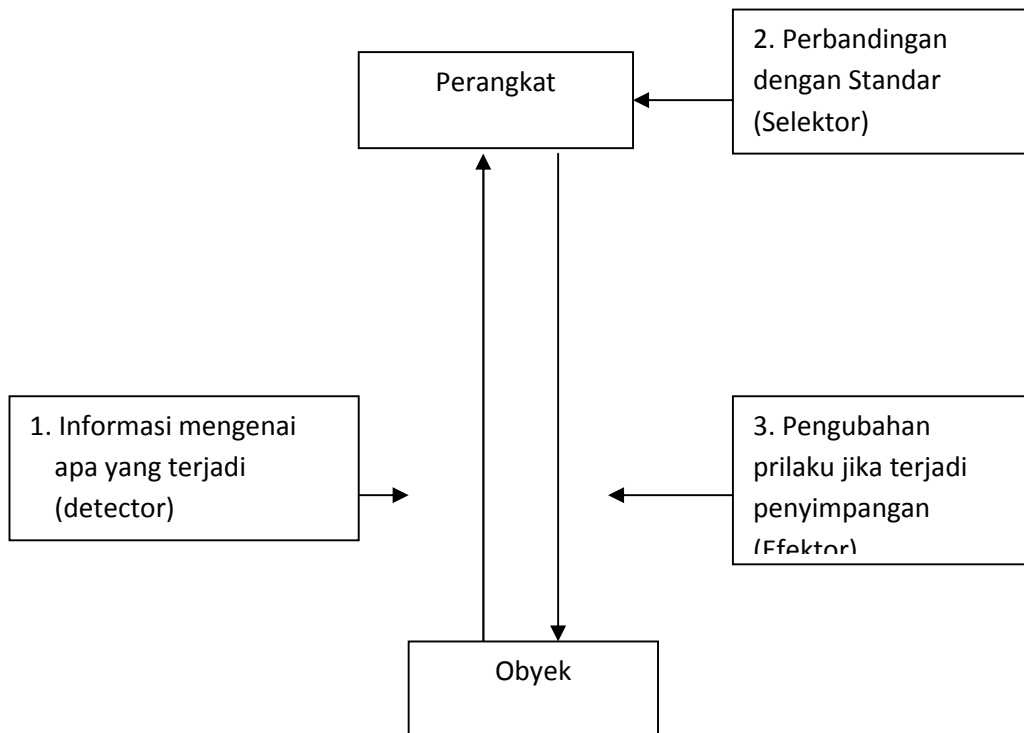
Sistem pengendalian manajemen mempunyai unsur-unsur :

- a. Detektor
- b. Selektor
- c. Efektor
- d. Komunikator²⁴

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen di atas satu sama lain saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Di bawah ini digambarkan proses kerja Sistem Pengendalian Manajemen.

²⁴Edy Sukarno, *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Cetakan I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 3.

Gambar II-1 Proses Pengendalian Manajemen



Sumber : Edi Sukarno, Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi, Cetakan I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 3.

Dari gambar pengendalian manajemen tersebut terlihat bahwa proses awal ketika detector mencari informasi tentang aktivitas. Detektor ini dapat berupa informasi, baik formal maupun informal yang menyediakan informasi kepada pimpinan mengenai apa yang terjadi di dalam suatu aktivitas.

Setelah informasi diperoleh, aktivitas yang terekam di dalamnya dibandingkan dengan standar atau petokan berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan dan seberapa jauh perlunya pembenaran²⁵.

Proses perbaikan dilaksanakan oleh efektor, sehingga penyimpangan-penyimpangan diubah agar kegiatan kembali mengikuti kriteria yang telah

²⁵Edi Sukarno, *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Cetakan I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 3.

diterapkan. Begitulah proses pengendalian manajemen, dinamis dan berkelanjutan.

Penerapan sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi sangat bergantung pada karakteristik organisasi bersangkutan, tetapi ada karakteristik umumnya yaitu :

1. Fokus sistem pengendalian manajemen adalah program dan pusat-pusat pertanggungjawaban.
2. Jenis informasi yang diproses terdiri dari data terencana dan aktual
3. Sistem ini merupakan sistem organisasi total yang berarti mencakup semua aspek operasi organisasi²⁶

Sehingga setiap pelaksanaan dari sistem pengendalian yang diterapkan dalam suatu perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen risiko pembiayaan agar bisa terlaksana dengan lebih efisien. Seperti yang diketengahkan oleh James A.F. Stoner dalam bukunya *Management*, bahwa efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan dengan benar (*to do things right*) dan efektif ialah kemampuan untuk mengerjakan yang benar (*to do the right things*).²⁷

²⁶*Ibid*, h. 4.

²⁷James A.F. Stoner, Philip W. Yelton, Jane F. Craig dan Kim D. Johnston, *Management*, second edition (Australia: Prentice Hall, 1994), h. 9.

5. Adapun Strategi Penerapan dari Sistem Manajemen Risiko diantaranya²⁸:

- a. Merumuskan Rencana Induk
- b. Penerapan Manajemen Risiko: Blue print, Roadmap yang selaras dengan SPIP
- c. Merumuskan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Sosialisasi
- d. Merumuskan Profil Risiko (Kondisi Awal) Menangani Risiko – risiko Utama (yang perlu penanganan segera)
- e. Menerapkan Rencana Induk, Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko secara Penuh

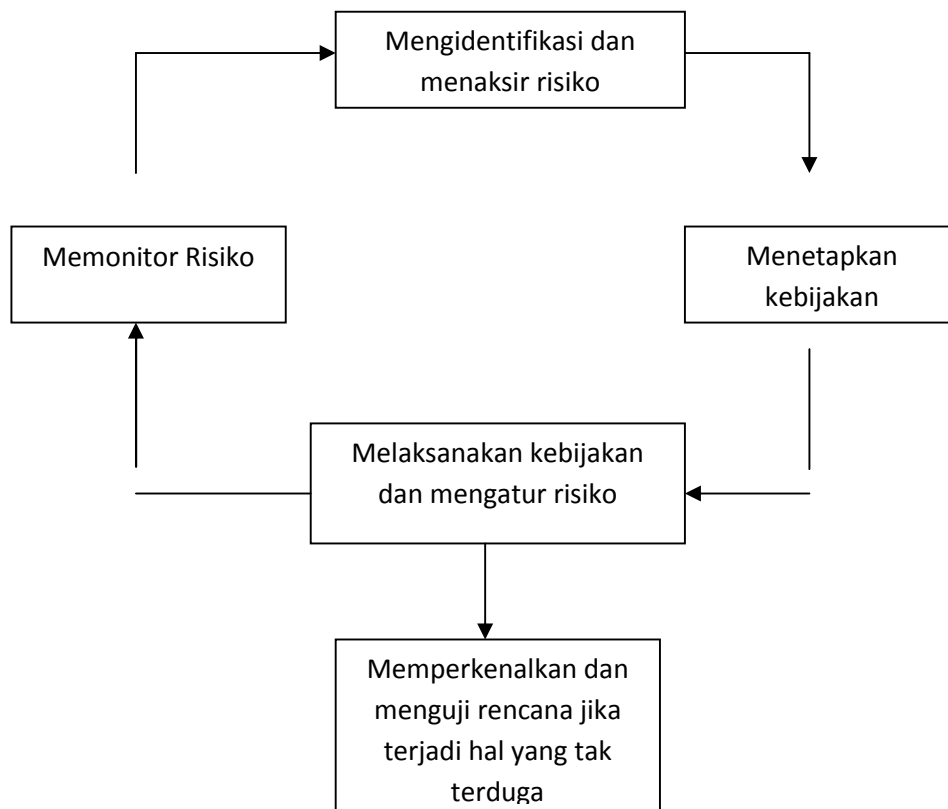
Kerangka manajemen risiko merupakan dasar dari setiap pengawasan yang dilaksanakan diantaranya :

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat materiil pelaksanaan proses

²⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan I, Jakarta, h. 22

pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha²⁹.

Gambar II-2. Struktur Untuk Mengatur Risiko



Sumber : Husein Umar, Manajemen Risiko Bisnis, Edisi II, Cetakan II, Gramedia, Jakarta, 2001, h. 12

Perusahaan harus mampu mengidentifikasi risiko, menetapkan kebijaksanaan, mengambil tindakan, dan memantau risiko, seperti yang diperlihatkan oleh bagan tersebut, ia merupakan proses yang berlangsung terus-

²⁹Husein Umar, *Manajemen Risiko Bisnis*, Edisi II, Cetakan II, Gramedia, Jakarta, 2001, h. 12

menerus. Jika digunakan dengan wajar, manajemen risiko dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Manajemen risiko dapat membantu perusahaan untuk mengatur kembali dirinya sendiri dan membuatnya menjadi lebih kompetitif. Manajemen risiko merupakan suatu alat yang dapat membuat perusahaan atau bank menjadi kuat.

6. Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, antara lain³⁰ :

- a. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam :
 - a) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja; misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya.
 - b) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), adalah risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*), dan sebagainya.
 - c) Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.

³⁰Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan I, Penerbit Gema Insani, Jakarta, h. 20

- b. Dapat-tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan ke dalam :
- a) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan (pindah) pihak perusahaan asuransi.
 - b) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan); umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.
- c. Menurut sumber/penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam :
- a) Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen dan sebagainya.
 - b) Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perusahaan kebijakan pemerintah, dan sebagainya³¹.

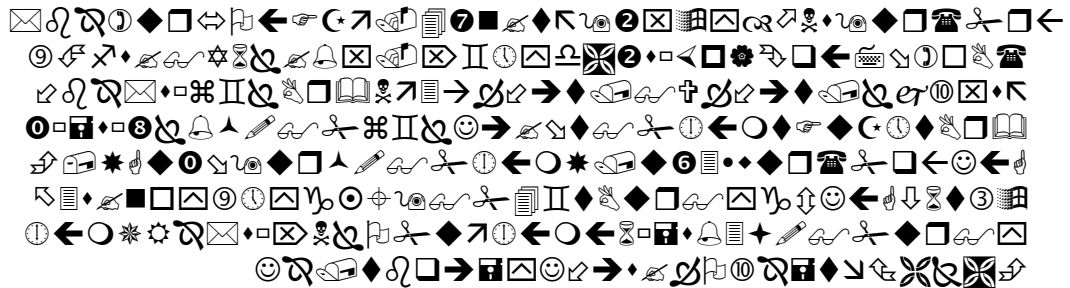
Firman Allah SWT dalam Surat (3) Ali Imran ayat 60 :



Artinya : *(Apa yang telah kami ceritakan itu), itu lah yang benar, yang datang dari Tuhan-mu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.*

³¹*Ibid*, h. 23

Dan dalam Surat (2) Al Baqarah ayat 283 :



Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Jika orang-orang yang menyalahgunakan amanat (berkhianat) adalah berdosa di sisi Allah SWT, dan dapat dihukum di dunia maupun di akhirat.

Rasulullah SAW bersabda ;

“Sesungguhnya pengurus-pengurus (manajer) yang buruk akan disiksa, berhati-hatilah engkau untuk menjadi mereka (manajer)” (HR. Muslim)

Bank Indonesia melalui surat keputusan No. 27/162/Kep/Dir yang disampaikan dengan surat edaran bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31

Maret 1995 telah mewajibkan semua bank umum untuk memiliki kebijakan umum pembiayaan secara tertulis.³²

7. Upaya Penanggulangan Risiko

Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan (perusahaan) untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain³³ :

- 1). Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan anti terbakar untuk mencegah bahaya melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kebakaran dan kerusakan, mengadakan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase dan pengacauan.
- 2). Melakukan retensi, artinya mentolerir membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulangnya (contoh : pos biaya lain-lain atau terduga dalam anggaran perusahaan).

³²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan IV, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, h. 224.

³³Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan I, Penerbit Grafindo Persada, h.17

- 3). Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan *hedging* (perdagangan berjangka) untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku/pembantu yang diperlukan.
- 4). Mengalihkan/meindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian.

Tugas dari seorang manajer risiko adalah berkaitan erat dengan upaya memilih dan menentukan cara-cara/metode yang paling efisien dalam penanggulangan risiko yang dihadapi perusahaan.³⁴

Dalam mengelola risiko, langkah-langkah proses yang harus dilalui adalah³⁵:

1. Mengidentifikasi/menentukan terlebih dahulu objek/tujuan yang ingin dicapai melalui pengelolaan risiko. Misalnya penghasilan yang stabil, kedamaian hati, dan sebagainya.
2. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadi kerugian/*peril* atau mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Langkah ini adalah yang paling sulit, tetapi juga paling penting, sebab keberhasilan pengelolaan risiko sangat tergantung pada hasil identifikasi ini.

³⁴Soeismo Djojosoedarso, *op. cit.*, h. 4.

³⁵T.Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi II, Cetakan 18, Jogjakarta, 2003, h. 34

3. Mengevaluasi dan mengukur besarnya kerugian potensial, dimana yang dievaluasi dan diukur adalah :
 - a. Besarnya kesempatan atau kemungkinan *peril* yang akan terjadi selama suatu periode tertentu (frekuensinya).
 - b. Besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan/keluarga (kegawatannya).
 - c. Kemampuan meramalkan besarnya kerugian yang jelas akan timbul.
4. Mencari cara atau kombinasi cara-cara yang paling baik, paling tepat dan paling ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat terjadinya suatu *peril*. Upaya-upaya tersebut antara lain meliputi :
 - a. Menghindari kemungkinan terjadinya *peril*
 - b. Mengurangi kesempatan terjadinya *peril*.
 - c. Memindahkan kerugian potensial kepada pihak lain (mengasuransikan).
 - d. Menerima dan memikul kerugian yang timbul (meretensi)³⁶.
5. Mengkoordinir dan mengimplementasikan/melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi risiko. Misalnya membuat perlindungan yang layak terhadap kecelakaan kerja, menghubungi, memilih dan menyelesaikan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi.

³⁶*Ibid*, h.38

6. Mengadministrasi, memonitor, dan mengevaluasi semua langkah-langkah atau strategi yang telah diambil dalam menanggulangi risiko. Hal ini sangat penting terutama untuk dasar kebijaksanaan pengelolaan risiko di masa mendatang. Di samping itu juga adanya kenyataan bahwa apabila kondisi suatu objek berubah penanggulangannya juga berubah.³⁷

Pengawasan kegiatan ekonomi pada lingkungan ekonomi Islam, disamping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan adanya Allah dan perhitungan hari akhir. Hati nurani ini adalah hasil bumi Islam, hasil iklim Islam dan hasil pendidikan Islam yang dijiwai dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadist:

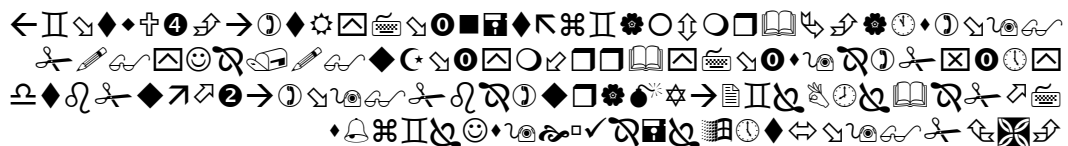
1. “Dan Allah ada bersamamu dimana saja kamu berada“
2. “Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit“
3. “Dia (Allah) mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada“
4. tatkala Rasulullah itu ditanya tentang maksud berbuat baik, beliau bersabda:
“(berbuat baik itu) engkau sembah Allah seolah olah engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat Dia maka Dia sesungguhnya melihatmu“.

³⁷*Ibid*, h. 41.

B. Sistem Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, konsep dasar manajemen risiko sudah dituliskan dalam Al-Qur'an sekitar 14 abad yang lalu. Salah satu cerita yang sangat indah dalam Al-Qur'an adalah mengenai Yusuf a.s. yang dalam satu bagiannya diperkenalkan bagaimana caranya mengelola risiko.

Allah SWT memperkenalkannya sendiri dengan firman dalam surat Yusuf



Artinya : *Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.*

Praktik manajemen risiko cemerlang lainnya juga dilakukan dalam perjalanan ke Madinah. Dari pada menempuh jalan yang paling singkat menuju Madinah yang terletak di arah utara dari Mekkah, seperti yang diperkirakan oleh para musyrikin, Nabi dan mengarah ke Yaman. Beberapa riwayat juga menyebutkan Nabi berjalan dengan ujung jari kaki (jinjit) agar tidak meninggalkan jejak kaki. Kisah ini memperkuat pesan bahwa bahkan Nabi sendiri perlu bertindak untuk memperkecil risiko, meskipun beliau yakin Allah akan selalu menolong.³⁸

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari kedua cerita di atas tentang Nabi Yusuf a.s. dan Nabi Muahammad saw. Islam tidak bertentangan dengan prinsip-

³⁸Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Edisi I, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2006, h. 18.

prinsip manajemen risiko, sepanjang praktek tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *dzulum* (ketidakadilan terhadap sesama).

Aktifitas dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

II-4 Karakter Manajemen Risiko Dalam Bank Islam³⁹

	Frekuensi	Materi/Isi	Contoh
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan Narrative Summary
Board level and Risk Management Committee	Tahunan	Summary	- Risk map - Narrative Summary
Middle Management	Triwulan	Summary + Detail	- Kuadrant - Operasional Risk Management Plan (ORMP)
Day to Day Operation	Bulanan	Detail	Frekuensi

³⁹*Ibid*, h. 20

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko (Karim, 2003). Gambar 1 menunjukkan perbandingan proses manajemen risiko antara bank Islam dengan bank konvensional.

1. Respon Terhadap Risiko Yang Signifikan

Respon yang sangat signifikan juga ditampilkan melalui peraturan PBI yang telah mengatur manajemen risiko bagi bank umum syariah yang ada di Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dan dalam pelaksanaan pengendalian risiko juga diatur dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 pada pasal 12 Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bagian Kesatu diantaranya yaitu⁴⁰ :

- a. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material.
- b. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a) sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan

⁴⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Cetakan II, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2011, h. 149

- b) laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank.

Pengenalan, ranking, dan pengendalian risiko di atas, juga dikenal sebagai proses analisis risiko. Setelah itu individu atau organisasi perlu memberikan respons yang tepat terhadap hasil analisis tersebut. Respon ini digolongkan pada salah satu dari lima kategori berikut :

1. Menerima atau menahan risiko. Bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima, individu atau organisasi dapat memutuskan untuk menerima risiko (tidak membaginya dengan pihak lain diluar dirinya). Sumberdaya yang tepat perlu dialokasikan untuk mengantisipasi dan mengkompensasi bila risiko tersebut terjadi.
2. Menghindari atau mengeliminir risiko. Bila risiko tersebut tidak dapat diterima maka individu atau organisasi perlu menghindarinya. Penghindaran suatu risiko dalam beberapa hal bisa berarti individu atau organisasi memutuskan untuk tidak meneruskan kegiatan atau bisnis yang menghadirkan risiko tersebut. Bila keputusan ini diambil, maka individu atau organisasi membutuhkan kegiatan atau bisnis alternatif untuk menggantikan kegiatan atau bisnis yang terdapat risiko dimaksud⁴¹.
3. Menetralisasi atau mengimbangi merupakan bentuk penyeimbangan suatu risiko dengan risiko lain yang memiliki pengaruh yang berlawanan bila kedua

⁴¹*Ibid*, h. 151

risiko tersebut terjadi. Islam memperbolehkan diambilnya langkah-langkah ini hanya bila di dalamnya tidak terdapat *maisir* atau perjudian.

4. Mengendalikan atau mengurangi. Ini merupakan tindakan memperbaiki risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima. Prose pengkajian yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan standar yang benar dapat dicapai.
5. Membagi risiko dengan yang lain. Ini untuk risiko di luar kemampuan seseorang atau organisasi untuk menerima atau mengendalikannya, maka suatu individu atau organisasi dapat membagi risiko tersebut dengan orang atau organisasi lain yang memiliki sifat risiko yang mirip satu sama lain. Dalam Islam praktek ini disebut asuransi syariah atau proteksi yang mutual.

Dalam Islam tidak dibenarkan memperjualbelikan risiko (memindahkan konsekuensi kerugian materi yang timbul akibat risiko), seperti halnya yang terjadi dalam asuransi konvensional. Praktik ini dianggap tidak adil bagi semua pihak karena mengandung *gharar*. Praktik tersebut dapat mengarah pada kelebihan beban kalim yang berada di luar tujuan semula yang dimaksudkan oleh pihak penanggung, atau dapat mengakibatkan premi yang akan dibayar oleh pihak tertanggung berada dalam tingkat yang kurang dapat diterima.⁴²

2. Perbedaan Manajemen Risiko Syariah dan Konvensional

⁴²Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Edisi I, Gema Insani, Jakarta, 2005, h. 21.

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk : penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya⁴³.

Tabel II-2
Perbedaan Manajemen Risiko Syariah dan Konvensional

No	Manajemen Risiko Syariah	Manajemen Risiko Konvensional
1	Identifikasi Risiko	Identifikasi Risiko
2	Ranking Risiko	Penilaian Risiko
3	Pengendalian Risiko	Mitigasi
4	Respon Terhadap Risiko	Monitoring
5	Perencanaan Reaksi	Evaluasi
6	<i>System Risk Assurance</i>	

Sumber : Muahaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Edisi I, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2005, h. 20.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian dari manajemen risiko syariah dan konvensional sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh, karena dalam Islam manajemen risiko sangat dianjurkan selagi manajemen risiko yang diterapkan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *dzulum* (ketidakadilan terhadap sesama).⁴⁴

⁴³*Ibid*, h. 23

⁴⁴*Ibid*, hal. 30.

Penyebab masalah harus dihilangkan, dan syarat-syarat yang sempurna merupakan bagian terpenting dalam proses pemberian pembiayaan. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian harus menjadi perhatian utama dalam manajemen pembiayaan. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi *forecasting, objective, policies, programes*, dan *budget*.

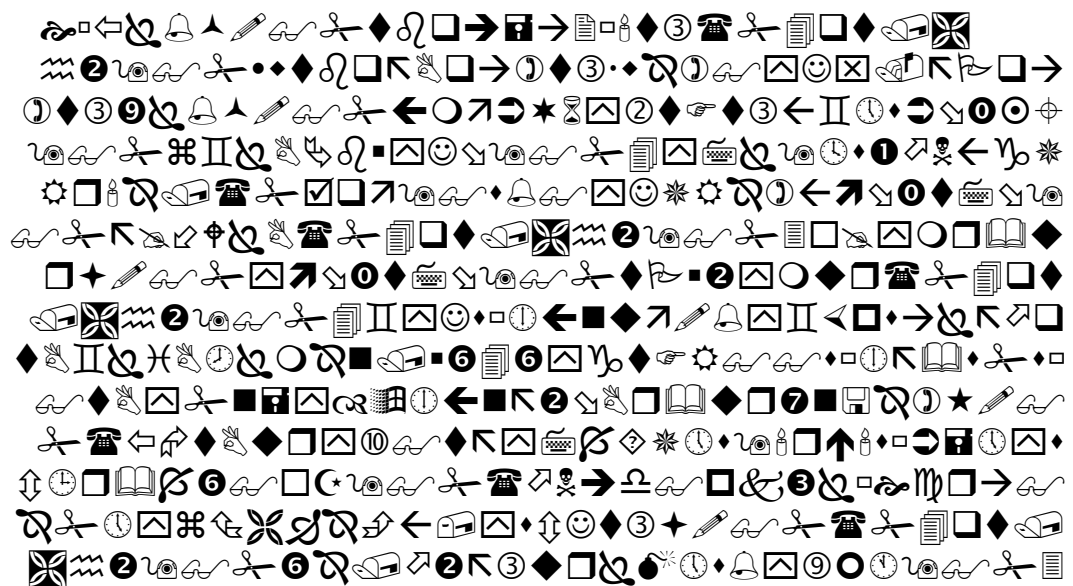
3. Sistem Bagi Hasil

Kontroversi mengenai haramnya bunga bank terus menuai pro dan kontra antara berbagai ulama di dunia. Ada yang menyebut bunga bank itu haram, dan ada juga yang menyebut bunga bank halal. Ulama yang menganggap bunga bank haram, berpendapat karena bunga bank melebihi dari apa yang telah ditentukan (dari pinjaman). Sedangkan ulama yang berpandangan bahwa bunga bank halal karena menganggap bank itu untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.

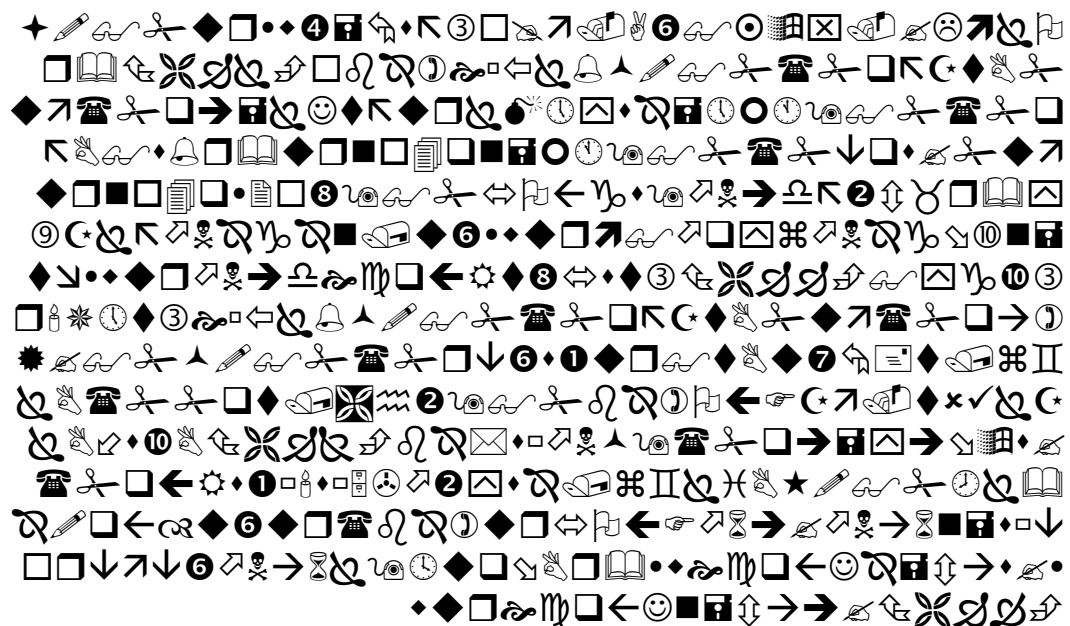
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Desember 2003 sudah mengeluarkan Fatwa mengenai riba. Ada tiga poin penting yang ada dalam fatwa tersebut yaitu: pertama, bunga bank adalah haram karena bunga model yang ada dalam bank konvensional telah memenuhi syarat syarat riba yang di haramkan oleh Al-Qur'an, kedua, daerah yang belum terdapat lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan konvensional tetap diperbolehkan atas dasar keadaan darurat, dan ketiga, orang yang bekerja pada lembaga keuangan konvensional tetap dibolehkan sepanjang ia belum mendapatkan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan syariah. Riba merupakan kelebihan atau penambahan. Menurut syara'

tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pemimjaman dan presentase yang ditetapkan. Orang-orang arab mengenal riba dari orang yahudi yang bayak tinggal dimadinah, sebelum Islam datang, orang-orang yahudi biasa melakukan riba dengan bungaberkisar antara 40-100 persen (%).

Kata riba dalam Al Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali pada surat Al Baqarah(2) ayat 275, 276, 278, 279, Surat Ar Rum (30) ayat 39, Suarat An Nisa (4) ayat 161 dan Surat Ali Imran (3) ayat 130. Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya. Larangan tersebut dalam ada Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Menurut nas Al Qur'an, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut, pada tahap pertama turunlah surat Ar Rum ayat 39, pada tahap kedua turunlah Surat An Nisa ayat 161, pada tahap ketiga turun surat Ali Imran ayat 130, dan tahap yang keempat turun surat Al Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279⁴⁵.



⁴⁵Tabloid Republika, *Dialog Jumat*, Jum'at, 8 Juni 2007. hal. 2



QS. Al Baqarah ayat 275 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini memperingatkan manusia tentang halalnya jual beli dan diharamkannya riba yang mempunyai akibat buruk bagi manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

Ayat 276 menerangkan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. Ayat 278 juga menerangkan riba tentang “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. Sedangkan ayat 279 “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa sistem muamalah meliputi berbagai aspek ajaran, bermula dari persoalan hak sampai pada persoalan lembaga keuangan⁴⁶.

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dan kepada pihak yang minus dana. Dengan demikian, bank dengan sendirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika bank mampu memobilisasi uang dari masyarakat secara langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank. Disamping itu uang disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan produktivitas pengusaha potensial⁴⁷.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan⁴⁸. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penghimpunan dan

⁴⁶Konsep lembaga keuangan secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al Qur'an, sebagaimana halnya dengan lembaga politik yang tidak pernah disebut bentuknya apakah kerajaan, Republik, Federal dan sebagainya. Nampaknya Al Qur'an membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Pada akhirnya lembaga-lembaga keuangan tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Oleh Wahbah Zuhaili, dikatakan dalam fiqh lembaga ini disebut dengan istilah "syakhsyiyah 'tibariyyah" atau "syakhsyiyah ma'nawiyyah". Dengan demikian lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya sebuah individu, seperti membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh dari usahanya (Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia, *Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 54).

⁴⁷Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2004, hal 20.

⁴⁸Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 22

penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagihasilkan harus di bagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan) diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan diganti dengan persentase bagi hasil. Dua bentuk rasio keuntungan di jadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas aktivitas bisnis produktif. Walaupun para ahli ekonomi muslim menekankan bahwa ada kekuatan *built-in* dalam sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa dalam mekanisme bagi hasil tidak akan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi.

Nejatullah Siddiqi melakukan analisis terhadap perilaku bagi hasil terhadap kondisi stabilitas ekonomi, bahwa: *"the introduction of ratios of profit sharing to replace rate of interest will not destabilize the economy and that the change in the entrepreneurial profit will not get communicated back all along the line"*⁴⁹.

Pernyataan ini menetapkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Analisis terhadap persoalan peran bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan menggunakan pendekatan

⁴⁹*ibid*, hal 27

analisis keseimbangan (*equilibrium*). Mekanisme analisis keseimbangan menyajikan bagaimana mekanisme penentuan *supply* (persediaan) dan *deman* (permintaan) atas tabungan.

Salah satu aspek sistem bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham, sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal. Jadi jika dalam usaha bersama mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama sama menanggung risiko.

Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain masing masing pihak melakukan kerja sama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal ini menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam bank Islam metode penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat dilakukan dengan cara: jual beli, pembiayaan, investasi dan bagi hasil⁵⁰. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah

⁵⁰Tim Pengembangan perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2002. h. 65.

kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana⁵¹.

Di dalam melakukan pembiayaan ada dua instrumen penting yang dipergunakan perbankan syariah, yaitu *musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* merupakan suatu bentuk organisasi usaha yang di dalamnya dua orang atau lebih mengambil bagian baik dalam pembiayaan maupun dalam manajemen usaha, dalam proporsi yang sama atau tidak sama besar. Laba dapat dibagi dengan perbandingan secara (tidak harus selalu harus demikian) yang disepakati bersama. Meskipun demikian, kerugian harus dipikul secara proporsional sesuai dengan besarnya perbandingan modal usaha. Sedangkan *Mudharabah* merupakan suatu bentuk organisasi yang di dalamnya seorang pengusaha menyediakan manajemen tetapi dananya dari pihak lain, berbagi keuntungan dengan penyandang dana dalam suatu perjanjian yang disepakati⁵².

Kegiatan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* ini dikenal dengan Istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Teori ini berpendapat bahwa bank islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko. Bank Islam dalam menentukan dalam menentukan keuntungan atau jasa adalah menurut laba yang diperoleh. Kedua belah pihak menanggung untung dan rugi. Keuntungan bisa naik dan bisa turun, tergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh. Kepada peminjam bank Islam

⁵¹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Op. Cit. h. 7.

⁵²M. Umar Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Moniter yang Adil*, diterjemahkan Oleh Lukman Hakim, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta. 1997. hal 44-45

tidak menentukan bunga dan kepada penabung tidak diberikan bunga, yang diberikan adalah keuntungan yang diperhitungkan atas dasar besar kecilnya laba yang didapat.⁵³

Hal mendasar perbedaan bunga dengan bagi hasil dan membedakan antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah sehingga ada istilah bunga dan bagi hasil. Ada beberapa perbedaan antara Bunga dengan Bagi Hasil yaitu⁵⁴:

a. Bunga

- 1) Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
- 2) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di pinjam
- 3) Pembayaran bunga tetap seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang di jalankan oleh nasabah untung atau rugi.
- 4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming” Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

b. Bagi Hasil

- a) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi

⁵³H. A. Hafiz Ansory, AZ, ed, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku III, Pustaka Firdaus, Jakarta. Hal. 49.

⁵⁴M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001. Hal. 61

- b) Besarnya rasio Bagi Hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh,
- c) Bagi Hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak,
- d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan,
- e) Tidak ada yang meragukan keabsahan Bagi Hasil.

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam hukum Islam dinamakan dengan *aqad* (transaksi). *Aqad* menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*) atau janji (*al-'ahdu*)⁵⁵. Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu⁵⁵.

Perkataan *al-aqdu* menagacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut *aqad*⁵⁶.

Di samping itu dalam Al Qur'an kata *al-aqdu* terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 1: "*bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya*". Adapun *al-ahdu* mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak

⁵⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 75.

⁵⁶Aiyub Ahmad. *Op. cit.* Hal. xxix

mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut⁵⁷.

Kata al ahdu ini terdapat dalam Al Qur'an Surah Ali Imran ayat 76:



Aritnya : (bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Aiyub Ahmad mengatakan bahwa dalam bahasa Arab *aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu.

Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing masing pihak secara timbal balik⁵⁸. Para ahli hukum Islam(jumhur ulama), memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya⁵⁹.

⁵⁷*Ibid*, hal xxix

⁵⁸*Ibid*, Hal xxx

⁵⁹Ghufron A. Mas’adi, Op. cit. hal 76

Dari definisi diatas terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut⁶⁰:

1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab dan kabul ini pada dasarnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki laki dengan laki laki lainnya mengenai sesuatu masalah yang mengandung akibat hukum. Akan tetapi sekarang ini ijab kabul bukan hanyaperjanjian antar laki laki tetapi juga antara laki dan perempuan, antarperempuan dan antara korporasi dan seseorang. Jadi, Ijab adalah pernyataankehendak oleh satu pihak (muji) untuk melakukan sesuatu atau tidakmelakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak muji tersebut oleh pihak lainnya (qaabli). Ijab dan kabul ini harus adadalam melaksanakan suatu perikatan.

2. Dibenarkan oleh *syara'*

Perikatan yang di buat oleh oleh kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika perikatan yang di buat ini bertentangan dengan syariat Islam maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*), tindakan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya akad yang disepakati akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam Islam akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak yang

⁶⁰*Ibid*, hal 76

membuat perjanjian akan tetapi juga ahli warisnya apabila dia meninggal sebelum melunasi semua kewajibannya.

Jadi akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*⁶¹. Mustafa Az Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu :

- 1) *tasharruf fil'i* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- 2) *Tasharruf qauli* (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada akad ini. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yakni:
 - a) *tasharruf qauli aqli*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
 - b) *Tasharruf qauli ghairu aqli*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Perkataan yang berupa

⁶¹Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005. hal. 48

pernyataan yaitupengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), secara ikrarwakaf, ikrar talak, dan pemberian hibah. Namun ada juga yang tidaksependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibahbukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya adapernyataan ijab saja tanpa ada pernyataam kabul, kedua *tasharruf* ini tetaptermasuk dalam tasharruf yang bersifat akad. Sedangkan perkataan yangberupa perwujudan adalah dengan melakukan penuntutan hak atau denganperkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum.

Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat syarat yang harusdipenuhi. Hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut hukum. Rukunadalah yang harus di penuhi untuk sahnya suatu perjanjian⁶², sedangkan syaratadalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan⁶³.Dalam syariah rukun dan syarat ini sama sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada⁶⁴.

Walaupun rukun dan syarat sangat menentukan sah tidaknya suatu akad akan tetapi menurut para ulama *Fiqih*memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, *KamusBesar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. h. 966

⁶³*Ibid*, h. 1114

⁶⁴Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ichtir Baru van Voeve, Jakarta, 1996. h. 1510

dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri⁶⁵.

Hal ini dapat diambil contoh dalam shalat, rukun dan sujud adalah termasuk rukun shalat. Ia merupakan bagianbagian dari shalt itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud, maka shalat itu tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian dari diluar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah (kecualiada sesuatu hal sehingga tidak bisa wudhu dan diganti dengan tayamum).

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan olehpara ahli *fiqih*. Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanyasighat *al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain*(subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Karena *al-'aqidain* dan *mahallul al'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum). Kedua haltersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab Syafi'itermasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al Karikhi,bahwa *al-aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua haltersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad⁶⁶.

Jumhur ulamaberpendapat bahwa rukun akad adalah al 'aqidain, mahallul 'aqd, dan sighat al aqd.Sedangkan Mustafa Az zarqa, selain al 'aqidain, mahallul

⁶⁵Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salman Barlinti, *Op.cit.* h. 50

⁶⁶Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.* h. 79

'aqd dan *sighat al aqd* juga ditambah dengan *maudhu'ul* (tujuan akad), dengan menyebut sebagai *muqawimat 'aqd* (unsur unsur penegak akad). Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad⁶⁷.

Dalam hukum Perdata nasional (*Burgerlijk Weetboek*) dimana hak dan kewajiban baru timbul ketika telah terjadi pertukaran sesuatu, bukan pada saat terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Misalnya dalam kredit perbankan hak dan kewajiban baru timbul ketika nasabah peminjam menerima uangnya. Menurut hukum Islam kesepakatan atau akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Persesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Ucapan adalah sebagai bukti bahwa mereka telah tercapai persesuaian kehendak mengenai barang dan harga dalam perjanjian tersebut⁶⁸. Setelah terjadi kesepakatan maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Akad ini harus disaksikan oleh sekurang-kurang dua orang saksi dari kedua belah pihak.

Bentuk persesuaian kehendak itu dapat *sighat aqd* yang berupa *ijab* atau penyerahan oleh pihak yang satu disertai *qabul* (penerimaan) oleh pihak yang lain,

⁶⁷Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Op. cit. hal 51

⁶⁸Aiyub Ahmad, Op. cit. h. 25

yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan ini maka mulai timbul hak dan kewajiban dan terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibatkan mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban menyerahkan sejumlah harga dan berhak atas suatu barang sebagai kontra prestasinya⁶⁹.

Menurut hukum Islam, adapun yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara sukarela, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 1, yang artinya "*Ha i orang orang yang beriman, penuhilah janji janjimu*". selain itu setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dapat di pegang, hal ini sesuai dengan tuntunan yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW: "*tanda tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat*" (HR. Bukhari Muslim). Sedangkan Imam Malik menyebutkan bahwa perjanjian jual

⁶⁹Ibid, h. 27

beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berda dalam suatu majelis atau tempat, kecuali ada alasan untuk itu. Sementara itu menurut Imam Syafi'i, transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata kata *kinayah* (sindiran)⁷⁰.

Sedangkan Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* mempengaruhi terjadinya perjanjian jual beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak yang lain. Penjual mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudia pembeli datang berkata "sayaterima", kata-kata tersebut tidak mengikat si penjual⁷¹.

Abdoerraoef, mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tigatahap, yaitu⁷²:

- a) *Al 'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan kemauanorang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melakukanjanjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. AliImran (3) ayat 76: "*(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji(yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*"
- b) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang

⁷⁰Aiyu Ahmad, Op. cit. h. 45

⁷¹Ibnu Rusyd, Badayah al-Mujtahid, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Kiswah, Banda Aceh, 2004. h. 47

⁷²Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970. h. 122 123

dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

- c) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*akdu*’ oleh Alqur’an yang terdapat dalam QS. Al Maidah (5) ayat 1: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akaditu...*”. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu*’ itu tetapi ‘*akdu*’.

Sementara itu **A. Gani Abdullah**, menyatakan bahwa dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (*ijab* dan *qabul*) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (*ijab* dan *qabul*) maka terjadilah ‘*aqdu* (perikatan)’⁷³.

Tabel II-3 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil⁷⁴

⁷³Gemala Dewi, Widyarningsih dan Yeni Salma Barlinti, op. cit. h. 47

⁷⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Cetakan Kedua, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, h. 37

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/ <i>ni bah</i> bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Bunga dapat mengembang/ <i>variable</i> dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	Rasio bagi hasil tetap tidak akan berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama
5	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.

Dari beberapa akad pembiayaan di perbankan syariah yang merupakan akad pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil adalah Mudharabah, Musyarakah, Al Muzara'ah dan Al musaqah.

a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *darbh* yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih sukamenggunakan istilah *qirodh* atau *muqaradhah*. Dalam kaitannya dengan muamalah, kata *darbh* disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (*profit*) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *shahibul maal* sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan karena kelalaian *mudharib* (*character risk*).

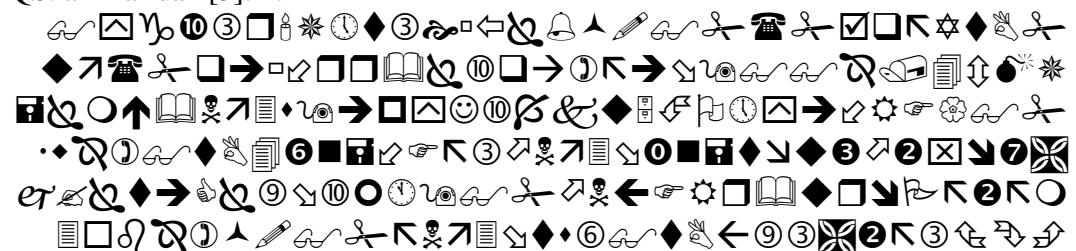
Aplikasi dalam perbankan prinsip *Mudharabah* ini adalah Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁷⁵

⁷⁵*Ibid*, h. 39

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun landasan hukumnya adalah⁷⁶:

QS. al-Ma'idah [5]: 1:

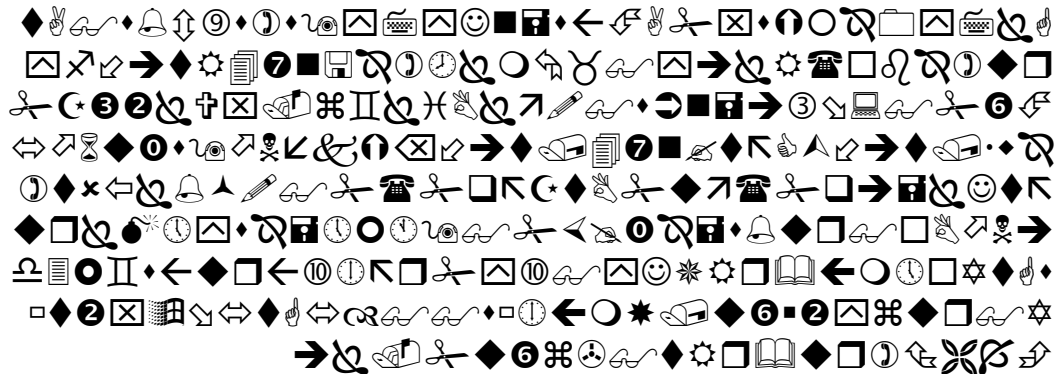


Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

“Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena – sebagaimana Ijarah Muntahiyah bi-al-Tamlik—bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nyab bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebut. Di saat berlangsung, Musyarakah mutanaqishah tersebut dipandang sebagai Syirkah ‘Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra’sul mal, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah.” “...Maka mereka berserikat pada sepertiga...”

⁷⁶Muhamad, *Bank Syari’ah*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ekonosia, 2008, h. 111

QS. Shaad ayat 24



Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Hadist

“dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jallaberfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain“ (HR. Abu Dawud)

Aplikasi dalam perbankan prinsip musyarakah ini adalah⁷⁷:

a) Pembiayaan Proyek

musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama sama menyediakan dana untuk membiayai proyek

⁷⁷Ibid, h. 132

tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal Ventura

pada lembaga keuangan khusus yang di bolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

c) Al Muzara'ah

Al Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam prinsip ini benih disediakan oleh pemilik lahan. Dalam hadist di riwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakah bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$, maka Rasulullah bersabda "hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya". Dalam konteks perbankan syariah dapat memberikan modal dalam bentuk pembiayaan bagi nasabah yang bergerak di bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

d) Al Musaqah

Al Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam Hadist Ibnu Umar berkata Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

4. Analisis dan Pengawasan Pembiayaan Dalam Pandangan Islam

Dalam terminologi pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syaria'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Tujuan khusus dari suatu analisis pembiayaan adalah :

1. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Sebenarnya pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu.

Adapun media pemantauan dari suatu pembiayaan diantaranya adalah :

1. Informasi dari luar bank syariah

Diupayakan data dari laporan periodik usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.

2. Informasi dari dalam bank syariah

Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi.

3. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.
4. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar
5. Periksa apakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.

6. Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKANBARU

A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri Pekanbaru

Bank merupakan suatu lembaga perantara antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana. Bank secara umum sudah ada sejak tahun 2000 SM di Babilonia, yang dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Bank ini aktivitasnya baru sebatas peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% setiap bulannya⁷⁸.

Pada masa itu alat pembayaran adalah emas dan perak di samping itu sebagai alat untuk menentukan harga. Sedangkan di Indonesia sendiri bank sudah ada sejak jaman Belanda dengan sebutan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) pada tahun 1824. kemudian pada tahun 1827 pemerintah Belanda mendirikan *De Javasche Bank* dan sekarang menjadi Bank Indonesia sedangkan NHM berubah menjadi Bank Eksport Import Indonesia. Pada tahun 1857 didirikan bank swasta pertama yaitu *NV EscomptoBank*, yang kemudian

⁷⁸Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal 38

dinasionalisasikan menjadi Bank Dagang Negara. Setelah bangsa Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik Negara dengan nama Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 14 oktober tahun 1945. setelah itu pada tanggal 17 agustus 1946 diresmikan Bank Negara Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1946. BNI ini selain bank komersil juga berfungsi sebagai bank sentral⁷⁹.

Pada masa pemerintahan orde baru masalah pembangunan ekonomi dan pembenahan moniter di kembangkan secara serius, maka di pergunakanlah prinsip anggaran berimbang dan lalu lintas devisa yang bebas. Kemudian di keluarkan oleh pemerintah paket kebijakan yang dikenal dengan Pakto 1988 yang mempermudah dalam pendirian bank bank swasta. Diantara materi yang diatur dalam Pakto 1988 yaitu:

- a. Pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar 50 miliar rupiah.
- b. Seluruh bank bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 bulan terakhir tergolong sehat.
- c. Perluasan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dan memperluaskewenangannya.
- d. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank devisa

⁷⁹Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hal 26

- e. Mempermudah bank asing untuk membuka cabang cabangnya di enam kota besaryaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.
- f. Mempermudah pendirian bank bank campuran (patungan) di enam kota tersebut.

Bank syariah di Indonesia berdiri seiring dengan bergulirnya reformasi dibidangperbankan yang ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992.ketika itu bank syariah belum disebut sebagai bank syariah hanya di sebut dengan bank bagi hasil. Akan tetapi ini merupakan tongkat sejarah yang perlu di catat dalam fase pendirian bank syariah di Indonesia. Perbankan syari'ah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syari'ah. Dengan di awali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah, kini bank syari'ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Bank syaria'h mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, di awali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitu Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti⁵⁸. Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari'ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim

kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IVMUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990⁸⁰.

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam duabagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat, *pertama* bagi yang mengeluarkan atau yang mengfatwakannya, dan *kedua* mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukan diri atas fatwa itu⁸¹. Karena sifat dan kekuatannya seperti itu, maka berlakunya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam. Berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari Al Qur'an dan Sunnah, secara otomatis langsung mengikat bagi umat islam di Indonesia.

Hukum Islam yang terbangun dari sumber yang pokok dan terbentuk dari proses ijtihad merupakan norma atau kaidah hukum yang hanya memiliki kekuatan mengikat jika di akui,diterima, dan di laksanakan oleh umat Islam sesuai dengan tingkat kesadaran dankeimanannya. Sedangkan dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melaluiproses positivisasi atau formalisasi oleh

⁸⁰M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999). h. 278

⁸¹H.M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007,hal. 134

Negara melalui lembaga Legislatif dan BankIndonesia sebagai lembaga yang memiliki otoriter terhadap Perbankan Indonesia.

Alasan Pembukaan cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru,Tbk antara lain :

7. Internal

- a. Pelayanan Perbankan yang lengkap dan keinginan mewujudkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Sebagai Bank universal;
- b. Bank Muamalat Indonesia mempunyai jaringan yang luas sehingga memahami karakteristik nasabah dikalangan pebisnis yang memungkinkan untuk didirikan cabang Bank Muamalat Indonesia.

4. Eksternal

- a. Pendirian Bank Muamalat pada saat ini mendapatkan respon yang sangat baik dari bank-bank di Indonesia dengan kategori A. Pada tahun 2000 terpilih sebagai salah satu bank dengan pelayanan terbaik, tahun 2001 memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000 untuk bidang *Banking Service* dan *Teller*, selanjutnya pada tahun 2002 menempati peringkat ke-17 sebagai bank dengan predikat “sangat bagus” dari 145 bank di Indonesia dan pada tahun 2003 masuk dalam 10 bank paling aman;
- b. Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang diprakasai oleh masyarakat, MUI, pemerintah dan cendikiawan serta para pengusaha muslim. Beroperasi pada tahun 1992 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1992 dan menjadi perusahaan publik. Pada tahun 1993 beroperasi sebagai bank syariah;

- c. Penduduk Indonesia 90% beragama Islam dan hampir sebagian besar ekonominya terdiri dari kalangan menengah ke bawah yang mayoritas adalah ummat Islam, sehingga merupakan potensi pasar yang besar untuk beroperasi sebagai Bank Syariah;
- d. Berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah berdasarkan prinsip bagi hasil.

A. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

a. Visi

- 1. Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.
- 2. Dominan di pasar spiritual
- 3. Dikagumi di pasar rasional
- 4. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-gadits

b. Misi

- 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- 2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

B. Budaya kerja

Sesuai dengan penelitian ini yang terkait dengan unsur prestasi kerja karyawan dan mendukung pada baik-tidaknya perilaku di perusahaan, maka perlu untuk mengetahui pola budaya kerja Bank Syariah Mandiri, antara lain :

1. *Shiddiq*: Bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan Yang Maha Esa.
2. *Istiqomah*: Bersikap teguh, sabar, dan bersahaja.
3. *Fathanah*: Profesional, disiplin, menaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif.
4. *Amanah*: Penuh rasa tanggung-jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas serta melayani mitra usaha.
5. *Tabligh*: Bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan mitra usaha) untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di bumi.

C. Gambaran Kerja Karyawan

Setelah melalui proses dari beberapa pengamatan dan interview terhadap semua divisi pada struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, maka dapat disimpulkan mengenai gambaran kerjanya, yaitu :

1. Manajer pemasaran

- a. Bertanggung-jawab terhadap segala penyaluran kredit dan pengumpulandana tabungan yang berkenaan dengan pencapaian terget yang telahditetapkan pada masing-masing sub-ordinat.
- b. Melaporkan pertanggung-jawaban kepada pimpinan.

2. *Customer Service*

- e. Memberikan pelayanan dan informasi terhadap nasabah dan calon nasabah.
- f. Melayani pembukaan dan penutupan rekening tabungan sekaligus menangani penggantian buku tabungan.
- g. Memproses pembuatan ATM.
- h. Melayani pemberitahuan saldo melalui telephone.

3. *Marketing Officer*

- d. Menangani pembiayaan dan penagihan
- e. Menjaga dan mengontrol keluar masuk kredit agar tetap pada angka standar yang menjadi ketentuan perbankan.

4. *Analisis Officer*

- 1. Menganalisis data calon nasabah kreditur (Peminjam).
- 5. Meneliti dan mengamati kelayakan pemberian pinjaman

5. Manajer Operasi

- a. Bertanggung-jawab terhadap manajemen operasional bank setiap hari.
- b. Melaporkan pertanggung-jawaban kepada pimpinan.

a) Pelaksana operasi (dana dan jasa)

1. Mengatur keluar-masuk uang giral dan surat-surat berharga lainnya.

b) Pelaksana Administrasi dan Pembiayaan

1. Mengamati dan meneliti persyaratan calon kreditur (kelengkapan surat-suratijin usaha dan lain-lainnya yang dianggap perlu).
2. Mencairkan dana pinjaman setelah proses di atas.
3. Mengakses laporan keuangan pada pihak ekstern, yaitu kantor BankIndonesia di Surabaya, dan pihak intern pada kantor pusat Bank SyariahMandiri di Jakarta.
4. Meminta laporan dari divisi marketing mengenai lancar-tidaknyaangsuran kredit nasabah.

5. *Teller*

- a. Menangani arus kas setiap hari
- b. Menjaga rutinitas transaksi keuangan nasabah
- c. Menjaga likuiditas dana
- d.memonitor trnsaksi di teller

6. Pengawas Intern

- a. Membuat berita acara dari gambaran kerja pada setiap divisi setiap hari
- b. Menganalisis dari hasil dan risiko yang ditemukan di lapangan.
- c. Melaporkan pertanggung-jawaban kepada pimpinan

7. *Officer Rahn*

- a. Melayani transaksi gadai
 - b. Menaksir barang yang digadaikan berupa emas
 - c. Menentukan nilai atau harga jualnya.
 - d. Melaporkan pertanggung-jawaban kepada pimpinan
8. Pelaksana Sumberdaya Insani dan Umum
- a. Mengatur kebutuhan perusahaan.
 - b. Menangani pajak dan biaya telephone, air, listrik dan kebutuhan lain perusahaan.
 - c. Menangani kesejahteraan karyawan.
 - d. Menangani dan membawahi para tenaga supir, kebersihan dan Keamanan dan Melaporkan pertanggung-jawaban kepada pimpinan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil pada BMI Cabang Pekanbaru.

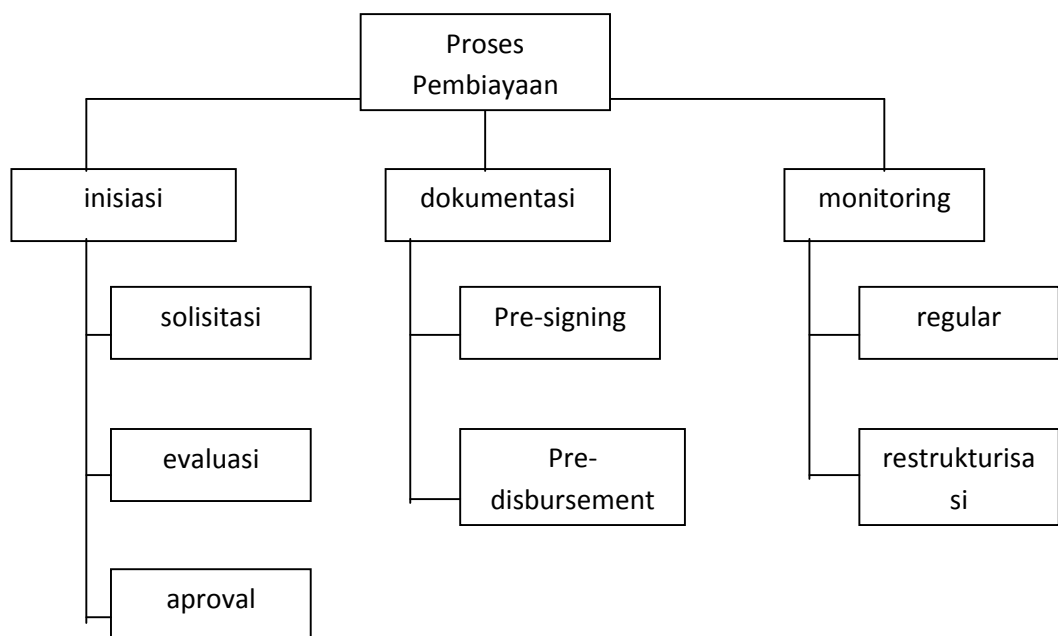
Sistem manajemen risiko yang diterapkan pada pelaksanaan pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia) dan ketika seorang nasabah datang ke bank maka Pihak bank khususnya bagian marketing harus jeli melihat kemampuan nasabah melalui syarat² pembiayaan yang harus dipenuhi.

Dan ketika Usulan Pembiayaan (UP) sudah diterima oleh pihak marketing maka UP tersebut harus dilaporkan kepada *Risk Management Division* merupakan independen dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dalam suatu proses pembiayaan.

Risk Management Division, Melakukan Risk Assessment yaitu penilaian secara independen dan transparan atas risiko-risiko yang mungkin timbul dalam suatu pembiayaan yang akan dilaksanakan yang telah diidentifikasi dan kemudian diusulkan langkah-langkah mitigasi risiko yang sesuai oleh seorang marketing sebelum UP tersebut disetujui dan biasanya ini disebut (*Before of The Fact*). Dan ketika usulan tersebut telah diberikan independen division kepada pihak marketing, maka pihak marketing akan memasukkan UP ke Pihak Direksi untuk pengambilan keputusan, apakah UP nasabah tersebut bisa diterima atau

harus ditolak. Dan jika ditolak maka UP tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Nasabahnya, Namun Jika UP nya diterima maka nasabah akan melalui proses seperti Gambar dibawah ini.

Gambar IV- 5 Proses Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada BMI Cabang Pekanbaru



Sumber : Document PT. BMI Pekanbaru

Dari gambar di atas tentang proses manajemen risiko terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil di PT. BMI Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Inisiasi

Merupakan proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bank muamalat, kemudian melakukan evaluasi, serta memberikan keputusan hasil evaluasi.

Dalam proses inisiasi terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil dapat dibagi menjadi tiga tahap diantaranya :

a. Solisitasi

Merupakan informasi yang berkaitan dengan nasabah, segala sesuatu yang bisa memberikan dampak terhadap kelancaran suatu pembiayaan yang diberikan.

Solisitasi terbagi 3 bagian diantaranya :

1. Informasi secara umum yang berkaitan tentang prospek masa depan, rencana kerja dan pemilik.
2. Informasi mengenai kebutuhan *customer* yaitu bidang usaha yang dijalankan.
3. Informasi mengenai kemampuan pembayaran kembali.

b. Evaluasi

Evaluasi merupakan kunjungan ke nasabah, dengan laporan kunjungan nasabah (*call report*). Laporan kunjungan nasabah (*call report*) tersebut menceritakan tentang semua keadaan nasabah seperti berikut :

1. Tujuan
2. Hasil kunjungan
3. Rencana tindak lanjut

4. Pengumpulan data-data
5. Surat Permohonan nasabah
6. Data legalitas
7. Data keuangan nasabah
8. Data jaminan
9. Proyeksi *cashflow*

Setelah data tersebut dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka semua data yang ada akan dimasukkan kedalam *financing file*, agar semua data nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah tidak hilang dan tersusun dengan rapi. Data yang dimasukkan ke dalam *financing file* contoh seperti berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Persetujuan | keterangan ringkas nasabah |
| b. Kolektibilitas | laporan kunjungan |
| c. Permintaan informasi | korespondensi intern |
| d. Penyidikan | korespondensi extern |
| e. Penilaian jaminan | permanen |

Data-data yang telah terkumpul akan mengalami tahap evaluasi yang terdiri dari 2 tahap, supaya ketika pelaksanaan transaksi pembiayaan musyarakah tidak akan mengalami kekurangan data dan tidak akan merugikan kedua belah pihak. Adapun tahapan dari evaluasi tersebut terdiri dari 2 tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi kelayakan usaha yang akan di biayai, yang melakukan pengecekan merupakan perusahaan INDOSNESOS yang berdiri sendiri

dan tidak memihak kepada kedua belah pihak baik bank maupun nasabahnya. Sehingga keputusan yang akan diambil tidak akan merugikan kedua belah pihak.

2. Evaluasi dokumentasi legalitas, taksasi jaminan, *checking* (BI, *Trade*, *Personal*). Evaluasi data disajikan ke dalam UP (usulan pembiayaan), dengan *outline* sebagai berikut :

- a. Tujuan.
- b. Latar belakang.
- c. Hubungan perbankan nasabah.
- d. Usaha nasabah.

Setelah melalui tahap evaluasi maka akan dilanjutkan ketahap yang berikutnya yaitu tahap approval.

c. Approval

Merupakan pemberian keputusan setuju atau tidak setuju permohonan pembiayaan musyarakah dari nasabah tersebut. Sebelum keputusan dibuat maka A/M mempersentasikan UP di depan komite pembiayaan (minimal 3 orang, yang salah satunya mempunyai limit *approval*).

Pemberian persetujuan akhir dan utama atas strategi, kebijakan, prosedur dan limit yang bertalian dengan risiko pembiayaan. Apabila disetujui maka A/M membuat *offering letter* (OL)/surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditandatangani oleh direksi/pemimpin cabang/kepala divisi. Sedangkan kalau ditolak maka seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat penolakan.

Setelah melalui proses inisiasi dalam manajemen risiko pembiayaan musyarakah maka akan dilanjutkan dengan tahapan yang kedua yaitu tahap dokumentasi.

2.Dokumentasi

Merupakan gambaran dari persetujuan suatu pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. OL (*offering letter*) merupakan dokumentasi legal berisi komitmen bank untuk membiayai usaha nasabah. Dokumentasi yang dilaksanakan terbagi 2 bagian yaitu, *Pre-Signing Documentation* merupakan surat tanda terima atau perjanjian antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) yang telah melakukan akad perjanjian pembiayaan. Dan *Pre-Disbursement Documentation* merupakan surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan realisasi suatu pembayaran pembiayaan seperti Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP), surat perintah transfer dana dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam OL.

Setelah pelaksanaan dokumentasi, maka akan dilanjutkan dengan proses monitoring yang akan dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan transaksi pembiayaan musyarakah.

3. Monitoring

Monitoring merupakan pengawasan dan pengarahan terhadap setiap persyaratan yang akan diberikan kepada nasabah. Monitoring yang dilakukan

merupakan monitoring yang khusus untuk pembiayaan musyarakah. Monitoring terbagi 2 diantaranya sebagai berikut :

- a. Regular merupakan memonitor secara rutin dan tetap tanpa ada perubahan setiap pelaksanaan transaksi pembiayaan musyarakah. Regular monitoring ini terdiri dari dua bagian yaitu monitoring aktif adalah mengunjungi nasabah secara regular dan memberikan laporan kunjungan nasabah */call report* kepada komite pembiayaan/*supervisor A/M*, dan monitoring pasif adalah memonitor pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan.
- b. Restrukturisasi merupakan memonitor kemampuan nasabah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar atau tidak angsuran yang akan dilaksanakan.

Setelah pelaksanaan proses manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah, maka sebelum memutuskan suatu keputusan harus melakukan implementasi dahulu yaitu kebijakan bank yang akan dibuat harus sesuai dengan misi dan usaha bank dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Implementasinya sebagai berikut :

1. Bank/lembaga keuangan harus menyakini bahwa usaha nasabah mempunyai kemampuan (*capacity*) untuk mengembalikan pembiayaannya, prioritas utama sehingga menjadikan transaksi berjalan dengan lancar.
2. Tentunya kemampuan (*capacity*) tersebut harus didukung oleh adanya modal (*capital*) yang cukup untuk dapat terwujudnya hasil usaha yang baik (karena

adanya keseimbangan antara modal dan hutang), sekaligus sebagai bukti bahwa nasabah memiliki keseriusan dalam mengelola usahanya, prioritas nasabah sehingga setiap waktu pelunasan tidak akan mengalami kemacetan.

3. Bank harus mampu memproyeksikan faktor-faktor internal & eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dimasa yang akan datang (*condition*), prioritas ketiga sehingga setiap usaha yang dilakukan nasabah akan berjalan lancar karena setiap waktu akan diawasi oleh pihak bank.
4. Totalitas nasabah dalam memberikan jaminan (*collateral*) terutama *supporting collateral* menunjukkan keseriusannya dalam usahanya, prioritas keempat.
5. Sementara *character* nasabah adalah sisi lain yang dapat mempengaruhi penilaian aspek kemauan untuk membayar kembali pembiayaannya (*willingness to pay*), oleh karena itu jika telah diketahui bahwa *character* nasabah tidak baik, sebaiknya langkah 1-4 diatas sudah tidak diperlukan lagi untuk dianalisis, pembiayaan langsung di tolak.

Untuk lebih mempermudah dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang akan dilaksanakan, dan agar tidak ada yang dirugikan maka bank melakukan beberapa macam pendekatan dalam pemberian pembiayaan :

- a. *Repayment approach* merupakan pendekatan dengan melakukan pembayaran kembali dimana nasabah diberikan kesempatan lagi untuk memenuhi kewajibannya.
- b. *Character approach* merupakan pendekatan dengan mengetahui sifat dan karakter dari nasabah tersebut.

- c. *Collateral approach* merupakan pendekatan dengan menentukan seberapa besar jaminan yang akan diberikan nasabah kepada bank.
- d. *Feasibility approach* merupakan pendekatan dengan memikirkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya sesuatu jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.
- e. *Agent of development approach* merupakan pendekatan dengan melihat perkembangan dari usaha yang telah dilaksanakan oleh nasabah.
- f. *Relationship approach* pendekatan dengan melakukan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak.

Setelah melakukan pendekatan maka bank harus menentukan faktor kunci dari suatu analisa pembiayaan (*key factor*) nya :

1. Seorang analis di dalam mengkaji/mengevaluasi permohonan pembiayaan nasabah sedapat mungkin mencari *critical point* dari suatu bidang usaha/bisnis nasabah tersebut.
2. *Critical point* bidang usaha adalah point-point yang sangat penting & sangat mempengaruhi hasil dari suatu bidang usaha (bisnis).
3. Pada umumnya *critical point* dari bidang usaha itu terletak pada aspek *capacity & condition*.
4. Dengan telah diketahuinya *critical point* dari suatu bidang usaha, tentunya analisis menjadi lebih tajam & fokus.

Setelah mengetahui kunci dari suatu analisa pembiayaan musyarakah maka akan dilaksanakan analisa pembiayaan diantaranya :

- a. Identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dari nasabah.
- b. Ketahui sumber pengembalian pembiayaan tersebut secara pasti.
- c. Kalaupun penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dan tuangkan dalam proposal pembiayaan (*loan evaluation*).
- d. Buatlah suatu keputusan layak/tidak (*loan descition approval*).
- e. Lakukan dokumentasi dan administrasi (*loan documentation and administration*).
- f. Lakukan monitoring untuk memastikan pembayaran kembali (*loan monitoring and collection*).⁸²

Terhadap pembiayaan yang telah dilakukan restrukturisasi harus dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk pembayaran angsuran.

Monitoring penyelesaian melalui LITIGASI ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan LITIGASI telah dilakukan.

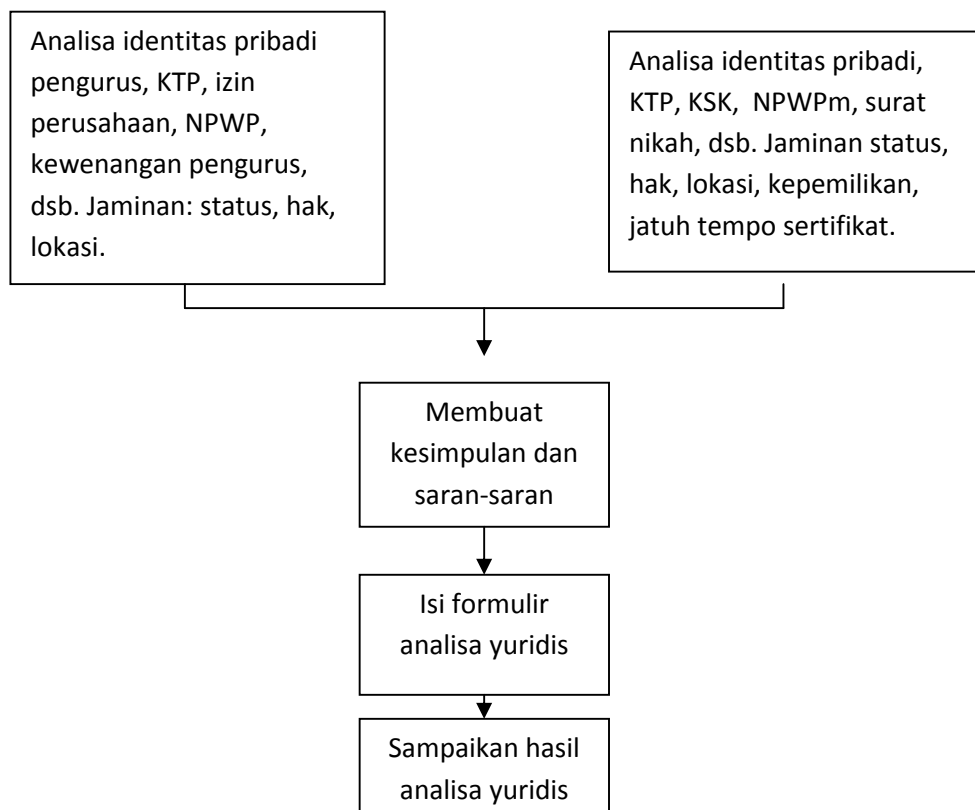
Sistem manajemen risiko pembiayaan merupakan tolok ukur dari suatu keberhasilan pembiayaan yang dilaksanakan suatu perbankan syariah. Ketika suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka sistem manajemen risiko

⁸²Dokumen PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Pekanbaru

pembiayaan sudah memperhitungkan seberapa besar kemampuan nasabah itu sendiri dalam melunasi pembiayaan yang diberikan ke padanya.

Sistem manajemen risiko terhadap pembiayaan yang dimulai dari memberikan keterangan kepada nasabah bagaimana bentuk pembiayaan musyarakah yang akan diberikan kepada nasabah. Dengan kelengkapan dokumen persyaratan seperti

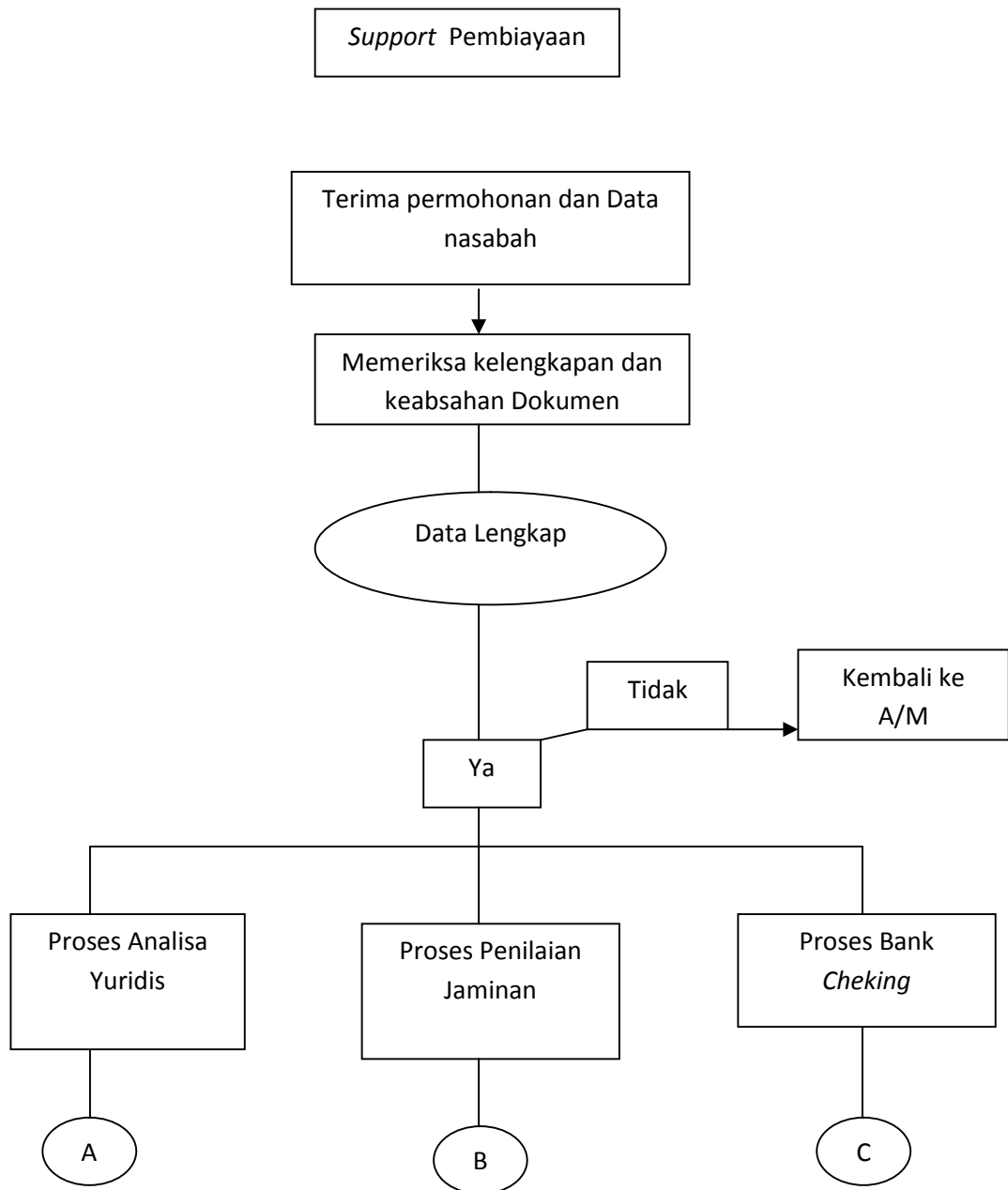
Gambar IV-6 Proses Analisa Kelengkapan Dokumen



PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

Setelah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen maka penyaluran pembiayaan musyarakah bisa dilakukan kepada nasabah, seperti gambar berikut ini.

Gambar IV-7 Penyaluran Pembiayaan



Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru⁸³

Setiap pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dilakukan harus melalui tahap yang telah ada pada gambar tersebut. Bahwa data nasabah akan diberikan

⁸³Dokumen Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.

kepada *support* pembiayaan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk menghindari terjadinya suatu penipuan dalam transaksi pembiayaan tersebut. Jika datanya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan dari bank tersebut maka akan ditolak dan akan dikembalikan kepada nasabah, akan tetapi jika datanya lengkap dan sesuai dengan ketentuan dari bank maka akan diterima dan akan melalui beberapa proses yaitu proses yuridis yaitu analisa tentang kelengkapan dokumen dari nasabah seperti identitas pribadi nasabah (KTP, NPWP, Jaminan, status, hak, lokasi, kepemilikan, jatuh tempo dan sertifikat.

Setelah pengecekan dokumennya maka dilakukan penilaian apakah setiap dokumen tersebut telah sesuai dan lengkap atau belum, untuk lebih memastikan dilakukan pengecekan terhadap bank lain apakah nasabah tersebut melakukan transaksi pembiayaan di bank lain, dan apakah lancar atau tidak lancar nasabah tersebut dalam memenuhi kewajibannya.

Jika semua persyaratan telah sesuai dengan ketentuan bank maka akan melalui 3 (tiga) proses yaitu :

1. Proses Analisa Yuridis merupakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diterima oleh pihak bank. Bahwa ketika pemeriksaan data dilakukan maka jika data tersebut telah lengkap dengan keabsahannya seperti apakah jaminannya merupakan sertifikat yang sah, dengan identitas kepemilikan yang lengkap, tapi jika masih ada kekurangan maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada *account officer* atau *marketing* yang

menangani nasabah tersebut. Supaya bisa menghubungi nasabah untuk memenuhi kekurangan tersebut. Jika nasabah dapat memenuhi nya maka akan dilanjutkan untuk proses yang selanjutnya, jika tidak maka dokumen akan dipulangkan kepada nasabah dan tidak bisa melanjutkan proses yang berikutnya.

2. Proses Penilaian Jaminan, merupakan proses yang dilaksanakan dengan langsung melakukan pengecekan terhadap jaminan tersebut. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan mempunyai hak dalam melakukan pengecekan terhadap jaminan nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan musyarakah di bank syariah tersebut. Jika jaminan tersebut sesuai dengan keabsahan hukum dan legalitasnya maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, sedangkan jika jaminan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka akan dikembalikan kepada nasabah dan transaksi tidak bisa dilanjutkan.
3. Proses Bank *Cheking* merupakan proses pengecekan yang dilakukan oleh Bank Muamalat melalui BI (Bank Indonesia) untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan atau pun pinjaman di bank lain, dan yang lebih penting untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah masuk dalam buku hitam BI atau nasabah tersebut merupakan nasabah yang sering gagal dalam memenuhi kewajibannya. Jika nasabah memenuhi persyaratan dan tidak pernah melakukan kesalahan maka transaksi pembiayaan bisa dilanjutkan, akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan dan pernah melakukan kesalahan maka ini akan berakibat fatal sekali sehingga

usulan pembiayaannya bisa langsung ditolak oleh bank karena jika dilanjutkan akan memberikan dampak negatif.⁸⁴

Setelah pelaksanaan ketiga proses tersebut selesai dilakukan maka akan dilanjutkan kepada proses akad. Dimana proses akad ini merupakan proses yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana akad pembiayaan ini berfungsi untuk memenuhi keabsahan serta persyaratan syariah yang memberikan dampak positif untuk dapat melindungi kepentingan bank. Ini juga memuat seluruh ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disetujui oleh komite pembiayaan.

Setelah pelaksanaan akad maka akan dilakukan pencairan dana sesuai dengan perjanjian dalam akad yang telah ditetapkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya. Sebelum dana dicairkan maka nasabah yang melakukan pengikatan pembiayaan musyarakah tersebut wajib membuka rekening di bank muamalat dengan menggunakan kartu Shar-E yang bisa digunakan sebagai kartu debit. Jadi nasabah bisa langsung memenuhi kewajibannya setiap bulan melalui kartu tersebut.

Jika nasabah melakukan cedera janji maka nasabah tersebut akan dikenakan sanksi setiap bulannya, yaitu 0,58/1000 dikalikan dengan jumlah plafond yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Dari pendapatan denda tersebut akan dimasukkan ke dalam Infak dan Shadaqah yang akan disalurkan ke pada kaum dhuafa.

⁸⁴Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, *Kebijakan Umum Dan Produk Pembiayaan*, Institute, 2010.

Walaupun pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tapi bank harus memikirkan cara untuk mencegah pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh Internal Audit diantaranya :

1. *Preventive* (oleh pejabat bank)
 - a. Kuasai aspek bisnis.
 - b. Analisa pembiayaan sesuai dengan persyaratan.
 - c. Lakukan *supervise* dan monitoring fasilitas pembiayaan dengan baik.
 - d. Perhatikan gejala dini pembiayaan bermasalah.
 - e. Segera lakukan *action* penyelamatan pembiayaan.
2. Penerapan *managing collectibility* dan perhitungan tingkat kesehatan pembiayaan. Budayakan penerapan *managing collectibility*, sehingga masing-masing akan secara cepat dapat mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan, agar pembiayaan tidak termasuk dalam katagori menjadi bermasalah, sehingga tingkat kesehatan pembiayaan tetap sehat yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi kesehatan pembiayaan BMI.

Tujuan *managingcollectibility* dan perhitungan tingkat kesehatan pembiayaan, agar dapat mengetahui :

- a. Teknik penyehatan pembiayaan dan pengelolaan *collectibility*
- b. Dapat membuat perencanaan untuk penyelesaian pembiayaan dan menghitung tingkat kesehatan pembiayaan yang diinginkan.

Collectibility adalah penggolongan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Sesuai dengan ketentuan, jumlah hari tunggakan & perhitungan *collectibility* adalah sbb:

Tabel IV-3 Penggolongan *Collectibility*

NO	JUMLAH HARI TUNGGAKAN	PENGGOLONGAN COLL
1	0	Collectibility 1
2	1 s.d. 90 hari	Collectibility 2
3	91 s.d. 180 hari	Collectibility 3
4	181 s.d. 270 hari	Collectibility 4
5	> dari 270 hari	Collectibility 5

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Pada lampiran 2.

Collectibility menjadi penting karena salah satu dampak yang ditimbulkannya akan sangat menentukan terhadap kelangsungan usaha suatu bank. Apabila *collectibility* semakin meningkat cenderung semakin memburuk (dampak negatif).

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru pada tahun 2011 sebagian besar tunggakannya apabila diurutkan sesuai dengan jumlah hari tunggakan maka sebagian besarnya terletak pada *collectibility* 1 dan 2, mengapa demikian ? karena nasabah akan diberikan negosiasi waktu untuk bisa memenuhi kewajibannya dan nasabah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Secara khusus tata-cara pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sebagaimana yang dijelaskan dalam PBI No. 9/9/PBI/2003. adalah sebagai berikut :

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah.
2. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
3. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
4. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar dan hampir mengalami kemacetan setelah dikurangi nilai agunan.
5. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel IV-4 Perhitungan *Collectibility*

COLLECTABILITY	% PERHITUNGAN BAD DEBT	%PERHITUNGAN PPAP
1	0	1%
2	25%	5%
3	50%	15%
4	75%	50%
5	100%	100%

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, pada lampiran 2

Penyaluran pembiayaan pada tahun 2011 yang disalurkan kepada nasabah dengan plafond Rp 60.000.000,00 dan margin 8,86 % dari dana tersebut, jangka waktu selama 3 tahun. Jadi setiap bulannya nasabah harus memenuhi kewajibannya sebesar Rp 2.109.667,00 (pokok +margin). Maka margin yang jumlahnya sebesar Rp 443.000/bulan. Penyisihan penghapusan aktiva produktif bisa dilakukan pada keuntungan bank yang sudah menjadi hak bank. Bank syariah khususnya memberikan 1 % terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif tersebut tanpa memberatkan nasabah. Dengan margin keuntungan dari nasabah penanaman dana $Rp \text{ /1000} \times 50/100 = Rp \text{ 11.518,00}$. Sehingga sisa dari bagi hasil tersebut keuntungan bank $Rp \text{ 2.098.149} \times 1/100 = Rp \text{ 20.981,00}$ PPAP nya. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar tapi selain jaminan bank juga mempunyai cadangan yang bisa untuk menutupi kekurangan dari suatu kewajiban pembiayaan yang belum terpenuhi.

Setiap pembiayaan mempunyai klasifikasi pembiayaan berdasarkan dari kelancaran suatu pembiayaan mulai dari awal proses pembiayaan sampai proses peluncuran dana kepada masyarakat sesuai dengan SK BI No 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-5 Klasifikasi Pembiayaan

No	Nilai Pembiayaan	Klasifikasi Pembiayaan
1	0 s/d < 51	Tidak Sehat
2	51 s/d < 66	Kurang Sehat
3	66 s/d < 81	Cukup Sehat
4	81 s/d < 100	Sehat

Sumber : PT. BankMuamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, pada lampiran 3.

Klasifikasi pembiayaan berdasarkan nilai pembiayaan sehingga bisa mempermudah dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan yang berikutnya. Pada tahun 2009, 3 % pembiayaan yang mengalami kemacetan atau tidak sehat, pembiayaan kurang sehat sebesar 35 %, cukup sehat 44 %, dan pembiayaan yang sehat sebesar 18 %. Dan pada tahun 2010 pembiayaan yang tidak sehat sebesar 3,8 %, pembiayaan kurang sehat sebesar 39,2 %, pembiayaan yang cukup sehat 46%, dan pembiayaan yang sehat sebesar 41 %. Dan ketika tahun 2011 pembiayaan yang tidak sehat sebesar 6,3 % semakin meningkat karena setiap tahunnya akan bertambah karena penggabungan dari tahun sebelumnya, tapi sebagian pembiayaan macet sudah banyak yang terlunasi dengan jaminan yang telah diberikan nasabah kepada bank. Dan pembiayaan kurang sehat sebesar 45 % terjadinya sedikit penambahan dari tahun sebelumnya karena sebagian nasabah sering telat dalam memenuhi kewajibannya, pembiayaan yang cukup sehat sebesar 43,35%, dan pembiayaan yang sehat sebesar 19 %.

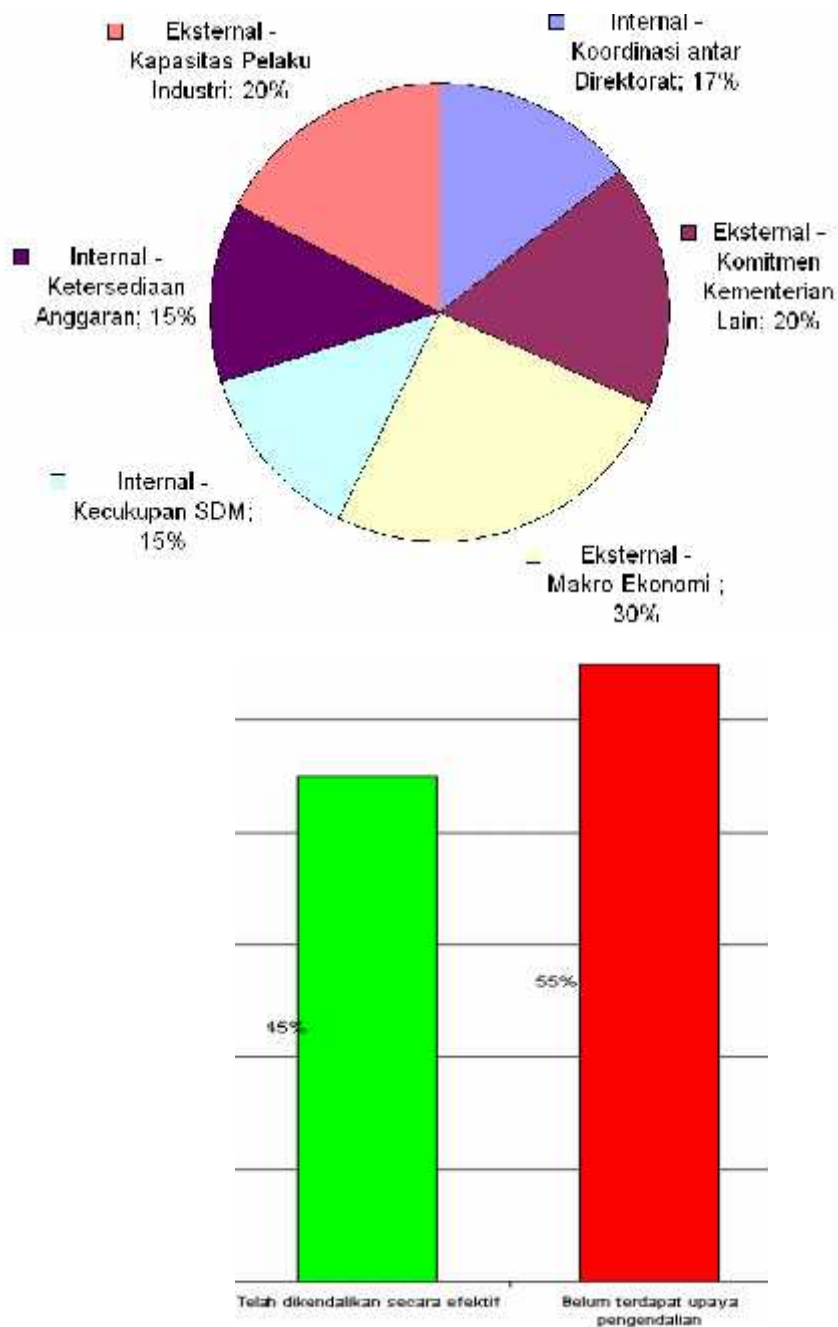
Dari kenyataan yang bisa dilihat setiap tahunnya bahwa kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan sudah semakin baik walaupun pembiayaan yang tidak sehat itu senantiasa bertambah tapi bank masih mengatasinya.⁸⁵

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Adapun Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan Sebagai lembaga keuangan yang salah satu kegiatan utamanya adalah menyalurkan dana kepada nasabah, BMI tidak terlepas dari risiko pembiayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, serta keuangan. Sedangkan faktor eksternal yang sifatnya berasal dari luar bank dan berpengaruh terhadap terjadinya risiko pembiayaan terdiri dari debitur, kebijakan pemerintah, dan persaingan dengan bank lain.

⁸⁵Dokumen *Basic Financing Training* , PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, 2010.



1. Internal Perusahaan

a). Sumber Daya Manusia

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang tata kerjanya dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karenanya, SDM penting untuk diperhatikan agar hasil kerja yang diperoleh dapat

optimal. Kualitas SDM terkait dengan risiko pembiayaan berkenaan dengan *moral hazard* dan *morale hazard*. Terjadinya *moral hazard* apabila karyawan dengan sengaja melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi bank. Sedangkan *morale hazard* terjadi karena kondisi atau lingkungan yang menyebabkan karyawan kurang hati-hati dalam melakukan proses pembiayaan kepada peminjam.

Account manager merupakan SDM analis pembiayaan yang sangat mempengaruhi risiko pembiayaan. Hal ini karena *account manager* mengetahui secara keseluruhan informasi calon nasabah dan melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk calon nasabah tersebut. Pada BMI, *moral hazard* tidak pernah dilakukan baik oleh karyawan maupun *account manager* karena setiap karyawan mendapat pengawasan ketat dari *supervisor* atau unit di atasnya begitu pula dengan *account manager*.

Sebelum pembiayaan disetujui, *account manager* harus mempresentasikan usulan pembiayaannya di depan komite pembiayaan dan berada di bawah pengawasan langsung *business manager*. Sedangkan *morale hazard* yang terjadi tidak mempengaruhi risiko pembiayaan secara signifikan. Hal ini karena pihak BMI melakukan upaya antisipasi untuk meminimalisasi terjadinya *morale hazard* melalui beberapa tindakan pencegahan risiko yaitu pada saat proses *recruitment* dan pelatihan analisis pembiayaan secara intensif. Perekrutan ditekankan pada *knowledge, skill, dan attitude*.

Analisis pembiayaan diberikan pelatihan terkait pembiayaan seperti, pelatihan analisis pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, pelatihan aspek legal dan akad-akad bank syariah, *project finance and loan syndication training*, serta *personal development*. Kualitas SDM terutama analisis pembiayaan yang baik akan meminimalisir risiko pembiayaan sehingga mengurangi kerugian akibat risiko tersebut.

b. Teknologi Informasi

Sistem Teknologi Informasi (TI) yang terpadu merupakan suatu keharusan bagi setiap bank untuk dapat mengelola jutaan informasi dengan efektif dan efisien. Disamping itu, ketentuan undang-undang perbankan dalam peraturan BI No 9/15/PBI/2007 menuntut setiap bank untuk menjalankan sistem IT terkini dalam rangka memantau dan mengendalikan risiko.

Sejalan dengan misi BMI untuk menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif maka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*, manajemen memahami pentingnya teknologi informasi yang terintegrasi, akurat, *up to date*, konsisten, tepat waktu, dan relevan dalam pengelolaan risiko.

Sebagai bukti komitmen dalam menerapkan manajemen risiko di bidang teknologi informasi, saat ini BMI telah menjalankan *Financing Originating System* (FOS) yaitu sistem informasi debitur yang mendukung kegiatan pemberian pinjaman dan pengelolaan risiko dengan kapasitas di atas puluhan ribu transaksi per menit.

Selain itu, BMI juga menggunakan Daftar Hitam Nasional dan *credit scoring model* (CSM) sebagai alat bantu pengambilan keputusan pemberian pembiayaan perorangan. Aplikasi tersebut memungkinkan efektivitas dan efisiensi waktu untuk menilai kelayakan calon peminjam secara tepat. Ketepatan penilaian kelayakan calon peminjam meminimalisasi kerugian risiko pembiayaan.

c. Kebijakan dan Prosedur

Ekspansi pembiayaan dari tahun ke tahun dapat meningkatkan potensi risiko pembiayaan. Oleh karenanya, perusahaan perlu menetapkan kebijakan yang mengatur pembiayaan tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis⁸⁶.

Kebijakan mengenai jangka waktu pengembalian dan *profit sharing* (nisbah bagi hasil) dengan peminjam berpengaruh terhadap

⁸⁶DPS dan Manajemen Risiko Perbankan Syariah,
Dikutip dari <http://agustianto.niriah.com/2008/12/21/dps-dan-manajemen-risiko-bank-syariah/>. Accessed 4

risiko pembiayaan. Kebijakan tersebut akan dapat meningkatkan atau mengurangi risiko pembiayaan.

Jangka waktu pengembalian adalah waktu jatuh tempo bagi peminjam untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaannya.

Semakin lama jangka waktu yang diberikan maka pengembalian yang diperoleh bank akan semakin besar. Namun di sisi lain, kemungkinan terjadinya gagal bayar semakin tinggi. *Profit sharing* antara bank dengan peminjam disepakati antara kedua belah pihak di awal perjanjian. Semakin besar jumlah dan yang dipinjam maka *profit sharing* yang diterima bank akan semakin besar pula. Namun di sisi lain, beban bank kepada penabung juga lebih besar apabila peminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya.

Hal ini karena keuntungan bank tidak diperoleh dengan cara konsep biaya dimana bank mendapatkan *spread positif* atau selisih antara pendapatan dari peminjam dengan beban yang harus dibayar kepada penabung. Keuntungan yang diperoleh bank adalah pendapatan dari pembiayaan yang kemudian dibagi dua dengan penabung berdasarkan nisbah bagi hasil di awal perjanjian. Di samping itu, bank perlu memberikan bagi hasil yang kompetitif guna menjaga loyalitas penabung agar tidak beralih kepada bank lain dalam menginvestasikan dananya.

Ketidakmampuan peminjam membayar kembali pinjamannya akan meningkatkan risiko pembiayaan. Oleh karenanya, kebijakan dan prosedur yang tepat terkait penetapan jangka waktu pengembalian dan penetapan nisbah bagi hasil disesuaikan dengan kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran

kembali. Hal ini membantu bank mengelola risiko pembiayaan sehingga mengurangi kerugian akibat risiko tersebut.

d. Keuangan

Kemampuan keuangan BMI berhubungan dengan kemampuan dalam mencadangkan sejumlah uang (cadangan penghapusan piutang ragu-ragu) untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat peminjam gagal bayar. Cadangan penghapusan piutang ragu-ragu harus mampu menutupi kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh BMI secara efisien dan efektif.

Dana yang dicadangkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu mewajibkan bank untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap (PPAP) terhadap pembiayaan yang disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PPAP minimum yang wajib dibentuk berdasarkan kualitas.

Kualitas Pembiayaan	Minimum PPAP
Lancar	1% x pembiayaan lancar
Dalam Perhatian Khusus	5% x (Pembiayaan DPK)
Kurang Lancar	15% x (Pembiayaan KL – agunan)
Diragukan	50% x (Pembiayaan D – agunan)
Macet	100% x (Pembiayaan M – agunan)

Sumber: PBI No.8/2/2006

Selama periode 2007-2011, persentase rata-rata CAR yang dimiliki BMI yaitu sebesar 11,48% atau berada di atas nilai minimal CAR yang harus dimiliki oleh bank berdasarkan ketentuan BI yaitu 8%. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat gagal bayar, sehingga dapat meminimalisasi risiko pembiayaan yang terjadi.

e. Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Internal control atau pengendalian internal adalah suatu bentuk pengendalian terhadap masing-masing faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan. Pengendalian internal ini berupa pengawasan aktif oleh *Branch Risk Control Officer* (BRCO) pada masing-masing cabang yang menilai kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko.

Dengan dilakukan *Internal control* maka bank dapat menfilterisasi sejak awal terjadinya risiko pembiayaan sehingga dapat mengurangi kemungkinan kerugian akibat risiko tersebut.

b. Eksternal Perusahaan

a. Kebijakan Pemerintah

Ketentuan dan tata cara tentang lembaga keuangan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank syariah pun secara khusus diatur dalam UU No 23 tahun 2008 dan PP No 72 tahun 1992, sehingga perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi.

Dalam praktiknya, manajemen risiko BMI mengacu pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), diantaranya

adalah PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No.12/07/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, dan PBI No.10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengelolaan risiko bagi perbankan syariah dengan dibentuknya regulasi manajemen risiko perbankan syariah secara tersendiri.

Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, membantu BMI menyelamatkan dan memperbaiki pengelolaan risiko yang memiliki variasi akad untuk produk pembiayaannya sehingga kerugian akibat risiko tersebut dapat diminimalisasi.

b. Peminjam

Peminjam merupakan pengguna dari pembiayaan yang diberikan bank. Terhentinya pembayaran kembali oleh peminjam berakibat pada terjadinya risiko pembiayaan. Hal ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan, artinya peminjam tidak mau membayar kewajiban pembiayaannya.

Selain itu adanya unsur ketidaksengajaan karena musibah seperti bencana alam juga menjadi faktor penyebab terjadinya risiko. Hal ini sulit dikendalikan pihak bank dan sifatnya berbeda dengan faktor internal dimana bank dapat mengawasi dan mengontrol faktor tersebut. Risiko dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari peminjam, diantaranya: karakter peminjam, pekerjaan atau usaha peminjam, dan musibah.

Karakter adalah sifat atau watak dari peminjam seperti kepribadian yang positif, kooperatif, dan tanggung jawab. Penilaian yang tidak objektif terhadap

karakter calon peminjam memungkinkan peminjam dengan sengaja melakukan pembiayaan macet. Penilaian karakter perlu diperhatikan karena berkaitan dengan i'tikad dan kesadaran calon nasabah untuk membayar kembali pinjamannya.

Pekerjaan dan usaha calon nasabah mempengaruhi risiko pembiayaan. Terganggunya kegiatan usaha yang berdampak pada pendapatan peminjam dapat mempengaruhi kemampuan membayar kembali pinjamannya. Selain dilihat dari sisi pendapatan, bagi peminjam yang memiliki pekerjaan atau berprofesi sebagai ahli hukum perlu diperhatikan apakah kooperatif atau tidak karena dikhawatirkan peminjam dapat menghindari kewajibannya dengan mencari kekurangan dari segi hukum atas perjanjian yang disepakati.

Musibah merupakan faktor penyebab terjadinya risiko yang berasal dari peminjam dan sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, seperti bencana alam dan pemutusan hubungan kerja. Karakter peminjam yang tidak *cooperative*, terganggunya kegiatan usaha, dan musibah yang dialami peminjam meningkatkan risiko pembiayaan.

c. Persaingan dengan Bank Lain

Perkembangan dunia usaha perbankan yang semakin agresif menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar bank. Setiap bank bersaing untuk terus menambah jumlah jaringan kantor pelayanan, menambahkan inovasi kedalam berbagai produk yang ditawarkan dan memberikan kemudahan dalam bentuk persyaratan pembiayaan dan proses pencairan serta kompetitif dalam memberikan

nisbah bagi hasil kepada peminjam. Dengan semakin mudahnya persyaratan pembiayaan dan proses pencairan, maka semakin banyak orang yang tertarik dengan sistem tersebut.

Bank Syariah Mandiri merupakan pesaing utama BMI yang memberikan pembiayaan tanpa jaminan bagi nasabah sehingga persyaratan pembiayaan dan proses pencairan lebih mudah dan cepat. Persaingan ini meningkatkan risiko pembiayaan.

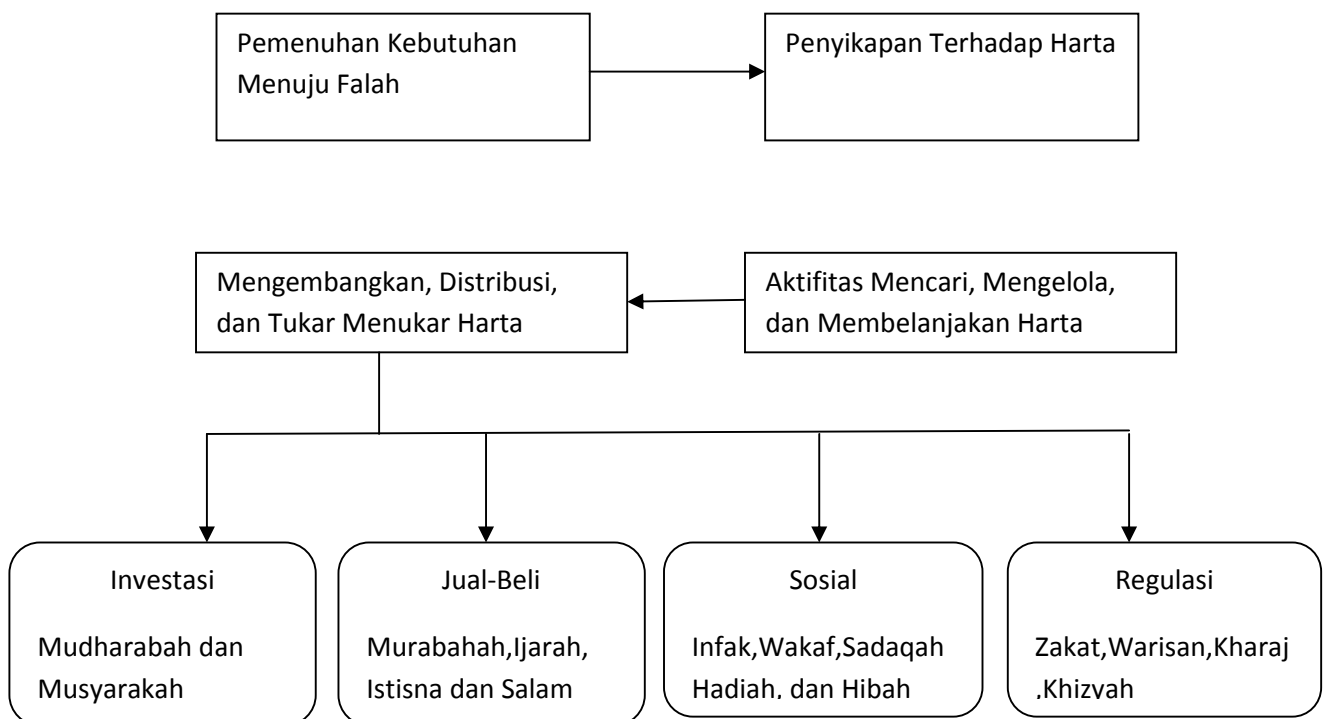
B. Penerapan Sistem Manajemen Risiko Pada Pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada BMI Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan suatu wadah bagi perbankan syariah untuk semakin berkembang menjadi suatu usaha yang lebih meningkatkan perekonomian rakyat. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai yang sesuai dengan Syariat Agama Islam.

Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan dengan sistem bagi hasil sangat membutuhkan sistem Manajemen Risiko dan yang mendominasi bagi setiap bank syariah yang ada di Indonesia khususnya bagi BMI Cabang Pekanbaru demi kelangsungan suatu transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil agar lebih

terlaksana dengan tepat sasaran dan tidak melanggar ketentuan agama. Yang pastinya setiap pelaksanaan transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

Gambar IV- 9 Hakikat Aktifitas Ekonomi



Sumber: Dokument PT. BMI Cabang Pekanbaru.

Dalam berbagai pembahasan mengenai risiko banyak dikemukakan definisi mengenai risiko tersebut. Secara ringkas risiko dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Namun demikian, dalam ranah analisis investasi, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Oleh karena itu, disini telah terjadi deviasi standar. Risiko ini muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Dan senyatanya kondisi ketidakpastian tersebut selalu muncul dalam kehidupan di dunia ini. Dengan adanya manajemen risiko maka manusia berharap dapat

mengurangi ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian atau dalam rangka memperkecil tingkat deviasi standar antara harapan dengan realita.

Dalam beberapa kasus, risiko bisa menghancurkan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Pada dasarnya, manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko dan pengelolaan risiko⁸⁷. Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Tulisan ini mencoba untuk membahas berbagai hal mengenai manajemen risiko dan kemudian mencoba mengungkapkan pandangan Islam dan fondasi dari manajemen risiko dalam perspektif Islam.

Cakupan manajemen risiko meliputi tiga hal utama yaitu Identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Identifikasi risiko

⁸⁷Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Mahasiswa S3 Ekonomi Islam PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dilakukan untuk mengidentifikasi risiko –risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Terdapat berbagai risiko yang dihadapi organisasi. Secara garis besar, risiko dapat dikategorikan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif.

Risiko murni merupakan risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh risiko jenis ini adalah kecelakaan, kebakaran, dan banjir. Risiko spekulatif adalah risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan tetap ada dalam usaha bisnis. Kita selalu mengharapkan keuntungan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan pihak tertentu tetapi akan menguntungkan pihak lainnya. Meskipun secara total masyarakat tidak dirugikan oleh risiko spekulatif tersebut. Setelah identifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah evaluasi dan pengukuran risiko. Evaluasi dan pengukuran risiko bertujuan untuk mengenali dan memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. dengan pemahaman yang baik, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan.

Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Terdapat beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risikonya. Probabilitas bisa digunakan untuk mengukur risiko. Ketika probabilitas tinggi, maka suatu risiko perlu mendapat perhatian lebih ekstra. Pengukuran risiko yang lainnya bisa pula dilakukan dengan teknik durasi. Hal ini biasanya dilakukan untuk menilai perubahan tingkat bunga.

Untuk risiko pasar, bisa digunakan teknik *value at risk*. Setelah melakukan analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko.

Evaluasi dan pengukuran risiko bertujuan untuk mengenali dan memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. dengan pemahaman yang baik, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Terdapat beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risikonya. Probabilitas bisa digunakan untuk mengukur risiko. Ketika probabilitas tinggi, maka suatu risiko perlu mendapat perhatian lebih ekstra. Pengukuran risiko yang lainnya bisa pula dilakukakan dengan teknik durasi. Hal ini biasanya dilakukan untuk menilai perubahan tingkat bunga. Untuk risiko pasar, bisa digunakan teknik *value at risk*. Setelah melakukan analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko.

Ketika probabilitas tinggi, maka suatu risiko perlu mendapat perhatian lebih ekstra. Pengukuran risiko yang lainnya bisa pula dilakukakan dengan teknik durasi. Hal ini biasanya dilakukan untuk menilai perubahan tingkat bunga. Untuk risiko pasar, bisa digunakan teknik *value at risk*. Setelah melakukan analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko.

Pengelolaan risiko perlu dilakukan secara cermat mengingat konsekuensinya yang cukup serius jika gagal dalam mengelola risiko. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lain. Mengelola risiko dengan cara menghindar adalah cara yang paling mudah dan aman, namun tidak optimal.

Sebagai contoh jika kita menghendaki keuntungan yang tinggi dair bisnis, tentunya kita harus menghadapi risiko tersebut dan mengelolanya dengan baik, tidak dengan cara menghindar. Retention bermakna kita menghadapi sendiri risiko tersebut. Sebagai contoh orang yang tidak mengasuransikan properti miliknya, berarti bahwa orang tersebut akan menanggung sendiri kerusakan – kerusakan atas propertinya. Selanjutnya adalah diversifikasi.

Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang ktia miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh ketika kita berinvestasi dalam saham, maka kita tidak akan menginvestasikan hanya pada satu saham saja, tetapi pada beberapa atau banyak saham. Transfer risiko dilakukan ketika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kemudian ditransfer ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Asuransi kecelakaan adalah salah satu contohnya.

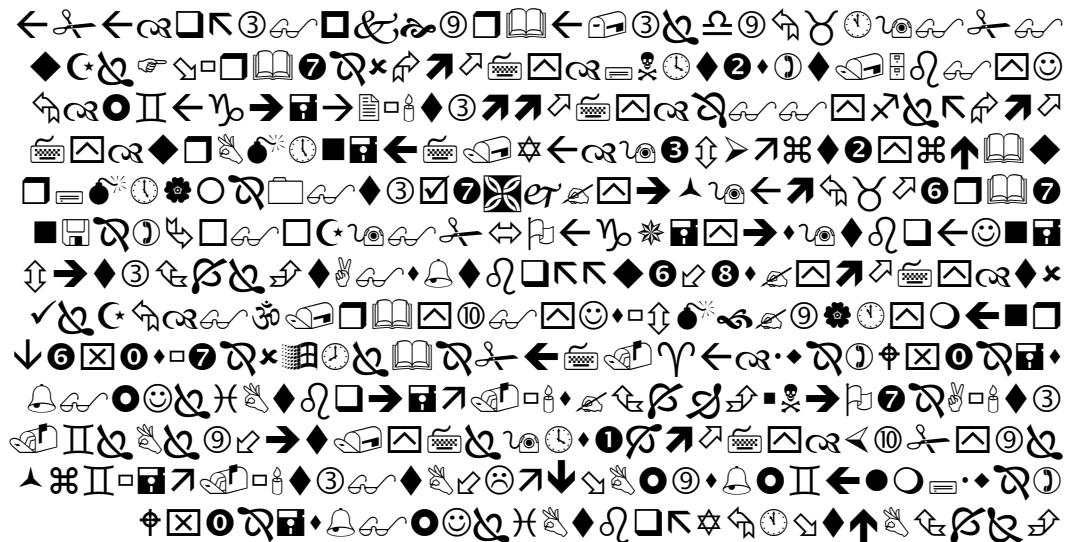
Dua hal lain yang terkait dengan pengelolaan risiko adalah pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh adalah pemasangan alarm kebakaran dalam bangunan ditujukan untuk mengendalikan risiko kebakaran. Pendanaan risiko mengaandung makna bagaimana menbiayai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Apakah dari asuransi kebakaran atau menggunakan dana cadangan adalah contoh risiko kebakaran.

Karakteristik pengelolaan risiko yang baik meliputi beberapa elemen, yaitu:

1. Memahami bisnis perusahaan. Hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen risiko perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap bisnis perusahaan dan keunikannya akan menghasilkan pelaksanaan manajemen risiko yang berbeda antar perusahaan.
2. Formal dan terintegrasi. Elemen ini merupakan upaya khusus yang didukung oleh organisasi dan manajemen puncak. Manajemen risiko formal meliputi tiga hal, yaitu infrastruktur keras seperti ruang kerja, struktur organisasi, komputer, model statistik dan sebagainya. Kedua adalah infrastruktur lunak seperti budaya kehati – hatian, dan organisasi yang responsif terhadap risiko. Ketiga adalah proses manajemen risiko itu sendiri yang meliputi indentifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko. Setelah itu kemudian ketiga hal tersebut diintegrasikan dalam perusahaan.
3. Mengembangkan infrastruktur risiko. Pembentukan sebuah komite manajemen risiko adalah salah satu contoh dari alat yang akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur risiko yang telah ada.
4. Menetapkan mekanisme kontrol. Manajemen risiko yang baik mempunyai sistem pengendalian yang baik pula. Mekanisme saling kontrol akan selalu tercipta. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, tidak ada orang yang mempunyai kekuasaan yang berlebihan untuk mengambil risiko atas nama perusahaan.

5. Menetapkan batas (*limits*). Penentuan batas merupakan bagian integral dari manajemen risiko. Manajer harus diberitahu kapan bisa/harus jalan dan kapan harus berhenti. Keputusan bisnis bisa diumpamakan sebagai gas, sedangkan manajemen risiko bisa diumpamakan sebagai rem. Jika manajemen risiko tidak berfungsi berarti perusahaan bisa diumpamakan mobil yang melaju kencang tanpa rem.
6. Fokus pada aliran kas. Manajemen risiko yang baik harus selalu fokus pada aliran kas. Pengawasan terhadap aliran kas ini harus memadai, sehingga mengurangi risiko kas yang mengalir ke tempat yang tidak semestinya.
7. Sistem insentif yang tepat. Hal ini akan membuat seseorang berperilaku tertentu. *People respond to incentives*.
8. Mengembangkan budaya sadar risiko. Budaya ini dapat diciptakan melalui cara – cara antara lain dengan menetapkan suasana keseluruhan yang kondusif untuk perilaku hati – hati, menetapkan prinsip – prinsip manajemen risiko yang mampu mengarahkan budaya organisasi, mendorong komunikasi yang terbuka, memberikan program pelatihan dan pengembangan, dan mendorong perilaku yang mendukung manajemen risiko.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:



(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." QS: 12: 46.

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49.

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian

ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut.

Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna.

Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Secara matematis sebenarnya apa yang dilakukan raja atas saran dari Yusuf tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

Hasil Barang konsumsi $_{7T1} = \text{konsumsi}_{7T1} + \text{saving}_{7T1}$ (barang konsumsi untuk tujuh tahun I)

Hasil Barang konsumsi $_{7T2} = \text{konsumsi}_{7T2} + \text{saving}_{7T2}$ (barang konsumsi untuk tujuh tahun II)

Dengan demikian yang terjadi pada masa Yusuf adalah sebagai berikut:

Tujuh tahun pertama $\Rightarrow X_1 = 0,5X_{k1} + 0,5X_{s1}$

Tujuh tahun kedua $\Rightarrow X_2 = 0$, sehingga $\text{konsumsi}_{7T2} = 0,5X_{k2} = 0,5X_{s1}$

Dengan kata lain, menurunnya hasil panen produk konsumsi pada tujuh tahun kedua ditutup dengan simpanan hasil panen pada tujuh tahun pertama, sehingga tingkat konsumsi pada tujuh tahun pertama akan sama dengan tingkat konsumsi pada tujuh tahun kedua. Secara total, selama empat belas tahun tersebut

bernilai 1, dengan pembagian masing – masing menjadi separuh untuk periode pertama dan separuh untuk periode kedua. Dengan demikian maka terbentuklah suatu garis lurus tingkat konsumsi rakyat negeri Yusuf.

Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif.

Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah azza wajalla. Tuhannya Ibrahim dan Muhammad. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Tuhan. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Tuhan. Namun hanya sedikit manusia yang berhasil mencapai Tuhan. Tuhan yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Tuhan. Dalam rangka mencapai Tuhan. Dalam rangka menuju Tuhan. Sesungguhnya sholat manusia, ibadah manusia, hidup manusia, dan matinya manusia hanyalah karena, untuk, dan demi Allah semata.

Segala kekayaan yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah semata. Allah-lah penguasa segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan yang kemudian diakui manusia sebagai milik manusia sejatinya adalah milik Tuhan. Bahkan diri manusia itu sendiri adalah juga milik Tuhan. Kepemilikan yang ada pada manusia bersifat relatif dan tidak abadi. Sedangkan kepemilikan yang ada

pada Tuhan bersifat mutlak dan abadi. Oleh karena itu, ketika manajemen risiko dilakukan oleh manusia dengan penuh tanggungjawab, maka sesungguhnya manusia telah berusaha untuk menjaga amanah yang dibebankan Tuhan kepada manusia untuk menjaga kekayaan milikNya.

Dengan menjaga amanah inilah kemudian manusia bisa dikatakan sebagai menyembah kepada Tuhan. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah saja. Lain tidak. Dengan menyembah Allah inilah kemudian dikatakan bahwa inilah jalan yang lurus yang disediakan Tuhan bagi manusia dalam upayanya mencapai Tuhan. Manusia yang memegang amanah dan kemudian menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya sesungguhnya telah memenuhi perintah Allah.

Dengan demikian, ketika manusia melaksanakan pengelolaan risiko dengan baik dan sempurna, berarti manusia telah berusaha menjaga harta kekayaan Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Dengan mendasarkan diri pada prinsip inilah kemudian dalam tataran lahiriah aplikasi dilaksanakan dengan mengelola risiko baik risiko murni maupun risiko spekulatif. Dan sejatinya ketika manusia telah melakukan pengelolaan risiko ini dengan baik maka dia telah memperoleh hidayah jalan yang lurus dengan adanya pemahaman dalam jiwanya mengenai arti penting pengelolaan risiko dengan baik.

Manusia ini tentunya akan mempertimbangkan bahwa di masa kehidupan setelah mati nantinya akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah

diperbuatnya terhadap harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Meskipun ketika seorang manusia gagal mengelola risiko kemudian menemui kerugian, tidak dengan sendirinya mengurangi harta kekayaan Allah. Kerugian itu kemudian hanya akan menimpa orang yang gagal mengelola risiko saja. Tidak berdampak apapun terhadap kekayaan Tuhan. Yang terjadi kemudian hanyalah perpindahan kekayaan dari orang satu kepada orang lainnya saja.

Kegagalan mengelola risiko ataupun keberhasilannya tidak berdampak apapun terhadap kekayaan Tuhan. Kegagalan dan keberhasilan hanya berdampak langsung kepada manusia itu sendiri. Kegagalan mengelola risiko juga hanyalah akibat kesalahan manusia sendiri. Bukan kemudian menjadi kesalahan Tuhan, meski Tuhan mempunyai kehendak atas apapun yang terjadi pada diri manusia. Manajemen risiko bagi umat Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Manajemen risiko yang baik mengindikasikan bahwa manusia berusaha menjaga amanah Tuhan atas harta kekayaan. Kegagalan mengelola risiko tidak kemudian membawa kerugian bagi Allah, tetapi hanya akan berdampak kepada manusia yang telah gagal dalam mengelola risiko tersebut. Kerugian yang dialami manusia akibat kegagalan mengelola risiko tidak berdampak apapun terhadap jumlah kekayaan Tuhan atas langit dan bumi ini. Kerugian yang diderita manusia yang gagal mengelola risiko hanya akan memindahkan amanat kekayaan kepada orang lain yang lebih baik dalam mengelola risiko.

Dengan pemahaman atas pengelolaan risiko yang baik, akan berdampak pada kemampuan manusia menemukan Tuhan. Sebagaimana metodologi Ibrahim

dalam memahami penemuan akan Tuhannya yang melalui proses yang panjang dengan penalaran yang benar.

Jadi, sebenarnya sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru sesuai dengan unsur syariah Islam karena ketika Sistem manajemen risiko yang telah dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia) maka akan disesuaikan lagi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum dilaksanakan dalam transaksi pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

C. Efisiensi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Transaksi Pembiayaan.

Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat cabang Pekanbaru memberikan dampak positif terhadap bank. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang diterapkan maka setiap pembiayaan semakin berjalan lancar dan setiap pemenuhan kewajiban bisa dilaksanakan sesuai dengan tempo waktu yang telah ditetapkan.

Sistem manajemen risiko semakin mempertingkat kelancaran dari suatu pembiayaan yang dilaksanakan sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet, jika sistem tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil meningkat menjadi 70 % kelancaran nya dari 50%, tahun sebelumnya sehingga ini memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan dan kelancaran pendapatan bank tersebut. Semakin lancarnya nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ini akan mempengaruhi besarnya pendapatan bank dan semakin

besarnya pendapatan maka akan memperbesar lagi pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah.

Seperti gambar diagram di bawah ini yang menggambarkan bahwa semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru merupakan suatu perantara yang sangat mempengaruhi peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagian dari nasabahnya merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai golongan.

Berikut ini adalah ulasan perbandingan pencapaian usaha Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 yang disusun berdasarkan Pedoman Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang telah diimplementasikan sejak tahun 2003.

Pada tahun 2009, pendapatan operasi utama Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1,95 M ; pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,96M (meningkat); dan terus meningkat pada tahun 2011 sebesar Rp 10,02 M (meningkat). Peningkatan tersebut terutama berasal dari pendapatan piutang seluruh pembiayaan.

Saldo piutang Pembiayaan secara keseluruhan tercatat sebesar Rp 13,25% dari Rp 16,06 T pada tahun 2009 menjadi Rp 23,97 T pada tahun 2010, sedangkan untuk tahun 2011 meningkat sebesar 24,77 % dari tahun 2010 menjadi Rp 26,07T.

Sistem manajemen risiko terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan suatu kebijakan di setiap perbankan yang menerapkannya dengan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari setiap peraturan yang telah dikeluarkan, karena setiap transaksi memerlukan suatu sistem yang mengontrol dari setiap pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Akan tetapi setelah saya melaksanakan penelitian terhadap pelaksanaan sistem manajemen risiko ternyata yang menjadi sebab utama dari munculnya risiko dalam suatu transaksi pembiayaan adalah karena kelalaian dan kurang telitnya pihak marketing dalam mengoreksi dan mengevaluasi nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Walaupun sistem manajemen risikonya sangat sempurna namun pihak marketing masih sulit mengevaluasi nasabahnya maka semakin besar kemungkinan risiko tersebut akan terus terjadi.

Jika diukur dari segi pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan manajemen risiko yang sekarang ditambah dengan adanya Independent Division maka biaya yang dikeluarkan sama seperti biasanya tanpa ada penambahan atau pengurangan dari pengeluaran biaya sebelumnya. Sedangkan kalau dilihat dari prosedural bisa dikatakan kalau sistem nya mengalami penambahan dan lebih rumit dari sebelumnya. Namun, bagi sebagian besar nasabah tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan prosedural pembiayaannya dan dengan adanya penambahan Team Independent Division tersebut maka mempermudah bagi marketing dalam mengenali karakteristik nasabah yang datang untuk melakukan pembiayaan pada bank tersebut. Supaya bisa mengurangi kesalahan dalam penilaian terhadap nasabah yang akan melaksanakan akad transaksi pembiayaan.

Adapun Hasil Penelitian yang menyatakan Efisien atau tidak dari Pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap Transaksi Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil dengan menggunakan rumus Untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

- RUMUS

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Jika Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan assets.

$$\text{Pada Tahun 2010} \quad ROA = \frac{170.939}{21.400.793} \times 100\% = 7.98 \%$$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru serta didukung dengan teori yang telah penulis pelajari dan pembahasan yang penulis lakukan pada pembahasan sebelumnya. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan diantaranya :

- a. Kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank Syari'ah mampu menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghilangkan bank Syari'ah dari kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.
- b. Sumber daya yang memadai perlu dicurahkan untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman aspek Syari'ah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.
- c. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam menentukan suatu kebijakan dalam sistem manajemen risiko pembiayaan dengan menerapkan prinsip *on the spot* dengan sistem pendekatan dan kunci dari pembiayaan itu sendiri secara langsung, sedangkan dari sistem manajemen risiko pembiayaan

berdasarkan teori lebih kepada bagaimana pengorganisasian terhadap suatu transaksi yang dijalankan tanpa harus langsung turun kelapangan menghadapi nasabah dengan sistem pendekatan dan kunci pembiayaan yang ingin diterapkan.

- d. Pelaksanaan sistem manajemen risiko pembiayaan yang dilaksanakan merupakan suatu keseimbangan terhadap pembiayaan yang dilaksanakan agar setiap transaksi pembiayaan berjalan dengan lancar dengan penggunaan pemberian tingkatan terhadap nasabah dengan menggunakan sistem *collectibility*. Dengan penerapan sistem *collectibility* maka akan diketahui kelancaran dari nasabah tersebut apabila akan melakukan pembiayaan terhadapnya. Dan ini merupakan suatu sistem yang sesuai dengan teori yang telah memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang tingkat nasabah berdasarkan kemampuan pelunasan pembayaran pembiayaan.
- e. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru telah lengkap menerapkan sistem manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan musyarakah karena sebagian besar pembiayaan berjalan dengan lancar dengan sistem manajemen risiko pembiayaan yang dimulai dengan proses inisiasi, dokumentasi dan monitoring dengan dilengkapi sistem *collectibility* yang memberikan informasi yang jelas tentang nasabah tersebut.
- f. PT. Bank Muamalat Indonesia Pekanbaru menerapkan sistem manajemen risiko pembiayaan secara *on the spot* sehingga pelaksanaan transaksi yang dilaksanakan berdasarkan apa yang telah dilihat dan dilaksanakan secara riil sehingga kebijakan yang dibuat untuk memanajemen risiko pembiayaannya

sebagian besar dari transaksi pembiayaan secara riil dalam pembiayaan musyarakah.

B. Saran

Melihat dari permasalahan diatas maka penulis mencoba memberikan saran diantaranya sebagai berikut :

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru harus lebih meningkatkan kedisiplinan dan ketegasan dalam penetapan suatu kebijakan bagi setiap pelaksanaan sistem manajemen risiko pembiayaan yang akan diterapkan, sehingga pembiayaan yang dilaksanakan akan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru harus meningkatkan lagi produk pembiayaan musyarakah khususnya dan meningkatkan juga produk lainnya, sehingga setiap masyarakat yang membutuhkan baik dari golongan atas, menengah dan bawah bisa terbantu dan mengurangi beban yang selama ini mereka rasakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Chapra, Umer. *Islam dan Pembangunan ekonomi*, Edisi I, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2000.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Edisi Revisi, Cetakan I, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Fauroni, Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan I, Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- Hartono Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermualah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Studia Press, Jakarta.
- H. Kara, Muslim, 2005, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek*, Edisi I, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Lubis, Ibrahim. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Manajemen*, Edisi VI, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta

- Noor, ZainulBahar. *Bank Muamalat : Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan, Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Bening, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang Undang)*, Mandar Maju, Bandung
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Poerwadarminta W.J.S, 1996 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Edisi Lisensi, Yayasan Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi II, Cetakan II, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003.
- Sukarno, Edy. *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Cetakan I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Sutanta, Edhy. *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi I, Cetakan I, Graha Ilmu, Jakarta, 2003.
- Tampubolon, Robert. *Risk Management (Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Edisi I, Cetakan I, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Tunggal, Widjaja, Amin. *Manajemen Suatu Pengantar*, Edisi I, Cetakan I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Umar, Husein. *Manajemen Resiko Bisnis*, Edisi II, Cetakan II, Gramedia, Jakarta, 2001.

Wirdyaningsih, Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, 2005.

